

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PEMULIHAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PASCA COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Muhammad Subarkah

1906016096

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PENGESAHAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PEMULIHAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PASCA COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

Disusun oleh:

Muhammad Subarkah

1906016096

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 3 Oktober 2023

Dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



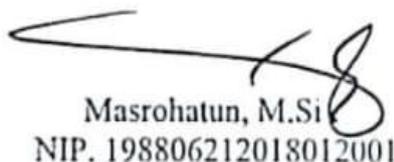
Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031003

Sekretaris



Tika Ifrida Takayasa, M.Ag
NIP. 198811152019032018

Penguji



Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa, M.Ag
NIP. 198811152019032018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, ... 3 Oktober 2023



Muhammad Subarkah

1906016096

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo
Semarang Di Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Subarkah

NIM : 1906016096

Jurusan : Ilmu Politik

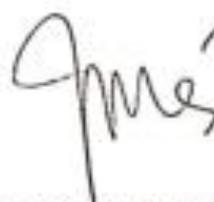
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pemulihan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 September 2023

Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa M. A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMULIHAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PASCA COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020”**. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan, kerja sama dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik.
3. Tika Ifrida Takayasa, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Superhero dan panutanku, Bapak Rodilan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Pintu surgaku, Ibunda Suratmi. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Untuk Kakakku, Ilham Wahyudi. Terima kasih banyak sudah menjadi penyemangat dan menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah setelah beberapa tahun meninggalkan rumah demi menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.

8. Teman Seperjuangan selama berada di Semarang. Dheas, Fahri, Jaisy, Ilham, Zaky, Salma, Ayu, dan Basma. Semoga tidak hanya menjadi teman pada masa kuliah, namun menjadi teman seterusnya dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
9. Untuk teman Bri6 semasa SMA. Rahmat, Zenden, Resya, Ardla, Ega, dan Triana. Karena mereka lah yang menjadikan salah satu alasan penulis kembali ke Bogor hanya untuk bisa nongkrong walau selalu di forest dan Tampo, kadang juga ngeCamp.
10. Teruntuk “Podcast Titik Kumpul”. Bang Abdur, Bang Arie, Bang Praz, dan Satpam komplek. Di tiap hari senin yang melelahkan berubah menjadi menyenangkan, tanpa di sadari podcast titik kumpul selalu menemani tiap tulisan penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga selalu menjadi pribadi yang menyenangkan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua, Bapak Rodilan dan Ibu Suratmi
2. Kepada Ibu Tika selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini
3. Alamamaterku, UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Kehidupan ini tragedi kalau dilihat dari sudut pandang yang sempit, tapi menjadi komedi kalau dilihat dari sudut pandang yang luas.” Charlie Chaplin

ABSTRAK

Ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor terguncang dengan adanya pandemi covid-19 dengan mengalami penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan, banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Bogor tidak melanjutkan usahanya karena terdampak covid-19. Banyaknya pelaku usaha mikro dipaksa untuk bertindak cepat dengan perubahan pasar sebagai akibat dari pandemi, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan terhadap pemulihan UMKM dalam menentukan kebijakan yang diambil pasca situasi darurat, sebagaimana covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam yang kemudian memerlukan perhatian khusus serta mengeluarkan kebijakan pasca covid-19 yang bertujuan pada pemulihan ekonomi di daerahnya secara khusus UMKM di wilayahnya.

Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle, dimana teori tersebut memiliki dua konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, isi kebijakan dan Implementasi Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasumber untuk mendeskripsikan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat melalui Bupati Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Bupati terkait dengan pembentukan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi Kabupaten Bogor yang di respon oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor dengan membuat program jangka pendek dan jangka panjang. dalam proses implementasi kebijakan tentu pemerintah tidak mampu berjalan sendirian sehingga adanya kolaborasi antar instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat dengan tujuan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor. Isi kebijakan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konsep Grindle, adanya kepentingan ataupun kebutuhan dari para pelaku UMKM yang mendesak mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan membentuk satuan tugas percepatan dan transformasi ekonomi daerah.

Kata Kunci: Pemulihan Ekonomi, UMKM, Covid-19, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Bogor

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II	16
KERANGKA TEORI	16
A. Definisi Konseptual	16
1. Implementasi Kebijakan	16
B. Teori Penelitian: Implementasi Kebijakan.....	18
a. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>).....	21
b. Konteks Implementasi (<i>Context of Implementasi</i>).....	23
BAB III	25
LANDSKAP KABUPATEN BOGOR DAN KEBERADAAN UMKM	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor	25
1. Sejarah Umum Kabupaten Bogor	25
2. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Bogor	25
3. Struktur Sosial Politik Kabupaten Bogor.....	29
4. Struktur Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor.....	30
B. Gambaran Umum UMKM Kabupaten Bogor	32
BAB IV PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR	36

A. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19	37
1. Dasar – dasar hukum program	38
2. Proses Pemulihan Ekonomi UMKM.....	46
B. Kolaborasi pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19	49
1. Kolaborasi Pihak Swasta.....	49
2. Kolaborasi Pihak Bank.....	51
3. Kolaborasi dengan Instansi lain	53
BAB V	55
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROGRAM PEMULIHAN UMKM DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020	55
A. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	56
a) Kepentingan yang mempengaruhi	56
b) Tipe Manfaat (<i>Type of Benefits</i>).....	57
c) Derajat Perubahan yang ingin dicapai (<i>Extent of Change Envision</i>)	60
d) Letak Pengambilan Keputusan (<i>Site of Decision Making</i>).....	61
e) Pelaksanaan Program dan Sumber daya yang dikerahkan	63
B. Lingkungan Implementasi (<i>Context of policy</i>).....	65
a) Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat (<i>Power, Interest, dan actor involved</i>).....	65
b) Kepatuhan dan Daya Tanggap Masyarakat (<i>Compliance and Responsiveness</i>).....	70
C. Masalah dalam Implementasi	74
D. Dampak kebijakan pada Ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor.....	75
BAB VI.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Refleksi Teori.....	78
C. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
BIODATA.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1	26
Gambar 3 2	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1	27
Tabel 3 2	28
Tabel 3 3	29
Tabel 3 4	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1.....	84
Lampiran 1 2.....	85
Lampiran 1 3.....	85
Lampiran 1 4.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah sangat terganggu oleh pandemi covid-19. Karena lockdown, pembatasan mobilitas, dan penurunan daya beli konsumen UMKM, yang biasanya merupakan pilar ekonomi lokal, mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagian besar dari mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, dan beberapa bahkan harus menutup pekerjaan mereka untuk waktu yang singkat atau bahkan secara permanen. Karena lembaga keuangan konvensional menjadi lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman, UMKM menghadapi kesulitan mendapatkan pembiayaan (Hernikawati, 2020).

Dampak ekonomi selama covid-19 di Kabupaten Bogor mengalami penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan, tercatat pengangguran sebesar 12,22% di tahun 2021, setelah di tahun pertama pandemi covid-19 pada tahun 2020 sebesar 14,29% telah berkurang 2,07% selisih penurunan ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dengan jumlah pengangguran sebesar 390.732 orang menjadi 340.604 orang, berkurang sebanyak 50.127 orang (RKPD, 2021). Banyaknya para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor terpaksa untuk tidak melanjutkan usahanya, sebanyak 718.337 unit usaha dari angka tersebut yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor sebanyak 329.379 unit usaha, pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan gambaran jumlah usaha mikro yang terdampak 45,85% (diskopukm, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk pada bidang ekonomi. Sektor yang sangat terdampaknya secara jelas adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Seluruh pelaku UMKM mengalami masa sulit didalam mempertahankan usahanya dikarenakan

penurunan pendapatan serta permintaan pada konsumen yang menurun, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 diantaranya adalah pembatasan pada alat transportasi publik, kemudian adanya pembatasan sosial diluar ruangan, dan pengurangan aktivitas ekonomi (Amri, 2020).

Banyak UMKM dipaksa untuk bertindak cepat dan beradaptasi dengan perubahan pasar sebagai akibat dari pandemi ini. Beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) beralih ke model bisnis online atau mengubah barang dan layanan mereka untuk tetap relevan. Di sisi lain, UMKM telah mempercepat adopsi teknologi sebagai akibat dari pandemi, dan banyak di antara mereka menggunakan e-commerce, layanan pengiriman, dan solusi teknologi untuk mempertahankan operasi dan bersaing di pasar yang semakin digital. Meskipun menghadapi banyak tantangan, UMKM juga menerima bantuan dari pemerintah dan berbagai organisasi, seperti program bantuan keuangan, insentif pajak, dan pelatihan online untuk membantu mereka bertahan dan pulih dari dampak pandemi (Wardani & Romas, 2021).

Meskipun demikian, masalah keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama. Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) yang bertahan dan beradaptasi dengan baik selama pandemi akan berperan besar dalam memimpin pertumbuhan ekonomi lokal setelah pandemi berakhir. Untuk memastikan UMKM mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan peran penting mereka dalam memperkuat ekonomi, pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh pihak harus berkolaborasi mengatasi masalah tersebut. (Hernikawati, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk pada bidang ekonomi. Sektor yang sangat terasa dampaknya secara jelas adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Seluruh pelaku UMKM mengalami masa sulit di dalam mempertahankan usahanya dikarenakan penurunan pendapatan serta permintaan pada konsumen yang menurun, hal

ini disebabkan adanya pandemi covid-19 di antaranya adalah pembatasan pada alat transportasi publik, kemudian adanya pembatasan sosial di luar ruangan, dan pengurangan aktivitas ekonomi, sebanyak 392.232 unit dari 450.200 UMKM di Kabupaten Bogor mengalami dampak dari covid-19 dari keseluruhan yang paling berdampak dari sektor makanan dan minuman (Amri, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komite Kebijakan, Sebagaimana disebut dalam Perpres tersebut, tugasnya meliputi menyusun rekomendasi kebijakan strategis untuk Presiden guna mempercepat penanganan Covid-19, pemulihan perekonomian, dan transformasi ekonomi nasional. Selain itu, ia bertanggung jawab mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan guna mempercepat penanganan Covid-19, pemulihan perekonomian, dan transformasi ekonomi nasional. Tugasnya juga mencakup melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, pemulihan perekonomian, dan transformasi ekonomi nasional. (JDIH BPK, 2020)

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 475.5/Kep.51-Hukham/2020 tentang komite kebijakan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 dan pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat, hal tersebut menjadikan dasar hukum pemerintah Kabupaten Bogor bertindak responsif dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 360/Kpts/Per-UU/2021 yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/352/Kpts/Per-UU/2021 tentang Pembentukan atas Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor (diskopukm, 2020). Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, kerja sama antara pemerintah Kabupaten Bogor, para pelaku UMKM, dan masyarakat tentu sangatlah penting. Dengan adanya dukungan serta strategi yang tepat, UMKM di wilayah

Kabupaten Bogor dapat bangkit kembali dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan nasional secara keseluruhan (Maghvira & Rusli, 2021).

Program pemerintah Kabupaten Bogor dalam memulihkan ekonomi UMKM di wilayahnya mengeluarkan program jangka pendek hingga jangka panjang sebagai tindakan yang proaktif terhadap masalah ekonomi lokal. Permasalahan serta tantangan pada program peningkatan kapasitas UMKM adalah terkait dengan rendahnya literasi digital dan teknologi informasi bagi sebagian pelaku UMKM. Hal inilah yang kemudian diperlukannya usaha dalam memberikan pelatihan dan bimbingan yang tepat agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usahasecara *online* dan memanfaatkan digital dengan maksimal, serta peningkatan kualitas produk dan inovasi pada produk tentu dimaksudkan agar produk mampu bersaing di pasar (Maliardi, 2023).

Hal tersebut perlu adanya dukungan dari seluruh pihak yang berkolaborasi dengan para pelaku usaha kecil tersebut, sehingga program percepatan dan transformasi ekonomi daerah Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan pemasaran yang tepat dimaksudkan seluruh produk yang dihasilkan UMKM dapat dikenal dan diterima oleh konsumen sehingga mampu mendapatkan pada akses pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Bogor selain perlu melakukan kerja sama pada dinas terkait, perlu melakukan komunikasi serta transparansi pada pelaku UMKM hal ini diharapkan mereka mampu memahami program-program yang di buat oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Koperasi dan UKM (Handayani, 2023).

Keterbukaan pada Implementasi kebijakan yang berperan menjadi suatu skema nasional yang dilaksanakan oleh banyak daerah di dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19, adapun strategi yang dimaksud yakni bagaimana strategi yang dibangun oleh pemerintah dengan strategi kolaboratif, didalamnya semua pemerintahan serta masyarakat

maupun pihak swasta yang terlibat dalam pemulihan ekonomi UMKM di wilayah Kabupaten Bogor. Peneliti terdahulu ini sejalan dengan apa yang akan hendak penulis teliti terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor pasca pandemi Covid-19 (Antu, et al., 2021).

Implementasi Kebijakan pemerintah dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Proses ini melibatkan berbagai aktor sosial seperti pemerintah, masyarakat, serta kelompok kepentingan. Implementasi kebijakan pemerintah turut serta melibatkan pada proses sosial yang kompleks dalam pembuatan keputusan, menjalankan program kerja, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (Grindle, 1980). Proses implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil melalui faktor komunikasi yang jelas dengan adanya tujuan dan sasaran kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (Pramono, 2020).

Pada penelitian terkait dengan implementasi kebijakan sangat penting untuk tetap melakukan pemantauan dan mengavaluasi keberhasilan kebijakan yang telah diterbitkan. Evaluasi ini mampu membantu dalam mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut telah berdampak positif ataupun negatif kepada masyarakat dan pada lingkungan masyarakat (Wardani & Romas, 2021).

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan terhadap pemulihan UMKM dalam menentukan kebijakan yang diambil pasca situasi darurat, sebagaimana covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam yang kemudian memerlukan perhatian khusus serta mengeluarkan kebijakan pasca covid-19 yang bertujuan pada pemulihan ekonomi di daerahnya secara khusus UMKM di wilayahnya, dalam hal ini mengkaji bagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan peraturan yang bertujuan meningkatkan ekonomi UMKM setelah situasi darurat.

Pentingnya penelitian ini tentu dapat membantu memperbaiki serta menguatkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, membantu individu dan masyarakat membuat keputusan yang lebih baik, pentingnya dilakukan penelitian ini terutama Pemerintah Kabupaten/Kota selaku yang berwenang mengeluarkan kebijakan daerah pada wilayahnya, dan dikarenakan penelitian ini akan sangat membantu pada evaluasi kebijakan serta pembuat kebijakan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna membantu mengembangkan kebijakan dan membantu masyarakat dalam memahami fenomena tertentu. Pengambilan kebijakan tentunya menjadi sangat baik apabila melihat bagaimana dan apa saja yang masyarakat butuhkan serta melihat bagaimana tujuan dari kebijakan itu ingin tercapai, sehingga menjadi lebih penting guna dilakukan kajian lebih mendalam.

Dari latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna meneliti lebih mendalam, melalui topik “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Melalui latar belakang masalah di atas, berikut rumusan dari masalah penelitian ini sebagai berikut **Bagaimana Implementasi Kebijakan pemerintah terhadap program pemulihan UMKM di Kabupaten Bogor?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Terkait rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

- a. Guna mengetahui apa saja upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid- 19.

- b. Guna mengetahui Kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor pada para pelaku UMKM terhadap pemulihan ekonomi pasca covid-19 di wilayahnya.
- c. Untuk implementasi kebijakan terhadap program peningkatan UMKM pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Bogor.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini harapannya mampu dijadikan masukan untuk pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19 berdasar kebijakan yang berlaku.
- b. Hasil dari penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkhusus Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
- c. Hasil penelitian ini harapannya mampu menjadi pengaplikasian ilmu yang diperoleh penulis serta sebagai ajang untuk memperbanyak pengalaman penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang terlaksana sebelum penulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan, dimana penelitian tersebut dilakukan dengan tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sepanjang penelitian penulis mengambil skripsi, buku, maupun artikel terkait kebijakan pengendalian Covid-19 pada Kabupaten Bogor. Berikut penelitian-penelitian terdahulu dari hasil penelusuran penulis:

1. Peningkatan Kapasitas UMKM

Penelitian mengenai peningkatan kapasitas UMKM dilakukan oleh (Alatas, Pontoh, & Morad, 2022) dengan judul “Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah: Peningkatan Produksi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan UMKM”, (Nafis, 2021) berjudul “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia UMKM di Masa Pandemi Covid-19”, (Yuliwati, Rofaida, & Gautama,

2021) dengan judul “Peningkatan Kapasitas Digital UMKM Melalui Pelatihan Pemasaran Digital di Masa Pandemi Covid-19 di Belitung”, (Hanim, Sopyono, & Maryanto, 2021) berjudul “Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19”, (Darwis & Zainuddin, 2020) “Penguatan Kapasitas Wirausahawan Mikro Menggunakan Metode Pendampingan di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang”, dan (Aprilia, 2021) “Peningkatan Kapasitas UMKM Kuliner Melalui Pelatihan Digital Marketing”. Adapun hasil dari penelitian di atas jelaskan sebagai berikut.

Alatas, Pontoh, & Morad, (2021) hasil penelitian tersebut strategi kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Buol. Nafis, (2021) penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ada permasalahan atau kendala pada keuntungan UMKM dan pemasaran maupun penjualan akibat pandemi covid-19, meskipun pemasaran lewat online juga memberikan tekanan kepada semua usaha baik secara besar maupun kecil termasuk UMKM.

Yuliwati, Rofaida, & Gautama, (2021) hasil dari penelitian tersebut terkait peningkatan kapasitas UMKM dalam menciptakan daya saing dan ketahanan dalam kerugian, sehingga diperlukan upaya yang tidak mudah terutama di masa adaptasi kebiasaan baru atau pasca pandemi. Hanim, Sopyono, & Maryanto, (2021) hasil dari penelitian ini pengembangan UMKM digital di masa pandemic covid-19 di Jawa Tengah UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Pengembangan UMKM berbasis digital menjadi salah satu alternatif penyelamat sektor UMKM di masa pandemic covid-19.

Darwis & Zainuddin, (2020) hasil penelitian tersebut terkait peningkatan kapasitas UMKM membutuhkan adanya keterlibatan dari pihak luar masyarakat, metode pendampingan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM secara individual dapat dilaksanakan secara efektif. Aprilia, (2021) hasil dari penelitian ini adalah program pelatihan digitalisasi menjadi dedikasi untuk membantu UMKM kuliner Karang Rejo dalam bertransaksi digital dengan

perluasan jaringan, program berjalan dengan baik dengan dukungan dari Kelurahan Karang Rejo sehingga pelatihan ini diharapkan dilanjutkan secara berkelanjutan.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu terkait peningkatan kapasitas UMKM menjadi bahan pembelajaran bagi penelitian saat ini, sehingga menjadikan posisi penulis adalah ingin menguatkan penelitian terdahulu.

2. Kebijakan Covid-19

Penelitian mengenai Kebijakan Covid-19 dilakukan oleh (Kadir, Alam, & Lukman, 2022) “Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19)”, (Anas, 2021) “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan”, (Karyono, Rohadin, & Indriyani, 2022) “Penanganan dan Pencegahan Pandemi Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu”, (Pratiwi & Hidayati, 2021) “Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Perspektif Hukum Responsif)”, (Isnan, 2021) “Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan PSBB”, dan (Tjakradiningrat, Pangemanan, & Rachman, 2021) “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Manado”. Adapun penjelasan dari hasil penelitian tersebut:

Kadir, Alam, & Lukman, (2022) hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan penanggulangan virus corona yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terlaksana optimal melalui tinjauan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan Covid-19. Anas, (2021) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah daerah guna menanggulangi virus corona keberhasilan pada Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi wabah Covid-19 dengan pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah mengenai cara mencegah serta mengendalikan Covid-19 pada transisi darurat ke pemulihan.

Karyono, Rohadin, & Indriyanim (2022) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kebijakan dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu guna menangani dan pencegahan Covid-19 menunjukkan tidak terlaksana maksimal, karena belum terlihat perubahan yang signifikan guna menangani Covid-19 pada daerahnya. Pratiwi & Hidayati, (2021) hasil dari penelitian tersebut menghasilkan gambaran tentang arah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Yogyakarta dalam menangani Covid-19, kebijakan dari pemerintah daerah telah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Pada pengimplementasiannya pemerintah daerah memiliki lokalitas dalam pencegahan virus corona disesuaikan dengan wilayah, pemerintahan, serta budaya pada masyarakatnya.

Isnan, (2021) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penanganan Covid-19 dengan instrument yang telah sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah, Tjakradiningrat, Pangemanan, & Rachman, (2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan belum berhasilnya dan tidak tepatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Manado, hal ini dapat dilihat dari ketepatan proses yang pertama *policy acceptance* yaitu proses pemahaman kebijakan yang tidak efektif dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Manado.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu terkait kebijakan covid-19 di berbagai daerah di Indonesia menjadi bahan pembelajaran bagi penelitian saat ini, sehingga menjadikan posisi penulis adalah ingin menguatkan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian terkait masuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), penulis turunlangsung dengan melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan serta mengumpulkan data (Arikunto S. , 1995). Metode penelitian kualitatif dipilih, metodekualitatif berguna dalam mengeksplorasi dan memahami

suatu gejala atau fenomena tertentu. Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber penelitian melalui pertanyaan yang bersifat umum. Setelah itu informasi yang telah didapat dikumpulkan dengan gambaran bersifat teks. Seluruh informasi yang didapat kemudian dianalisis, dilanjutkan dengan melakukan penjabaran dari hasil analisis terkait informasi yang telah didapat dengan mengaitkan pada penelitian terdahulu. Dan hasil dari penelitian kualitatif digambarkan ke dalam bentuk laporan tertulis (Creswell, 1998).

Pendekatan penelitian ini berupa studi kasus, yang merupakan penelitian dimana peneliti mencari informasi dari fenomena tertentu serta kegiatan (program, proses, institusi dan lain sebagainya) dan melakukan pengumpulan informasi dengan mendalam dan menggunakan proses mengumpulkan data pada periode tertentu. Sehingga peneliti mencoba menggali informasi dari berbagai narasumber dan data pendukung terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor serta mengumpulkan informasi mendalam terkait program peningkatan kapasitas UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemegang kendali di daerahnya.

b) Sumber data

Memiliki dua jenis penggunaan sumber data yakni:

1. Data Primer

Data dari perolehan secara langsung melalui sumber utama oleh penulis di lapangan dari narasumber, data primer ini digunakan penulis sebagai data pokok guna melakukan penelitian. Selanjutnya menjadikan sumber data primer dalam penelitian ini merupakan Bupati, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, dan Pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Datayang didapatkan penulis guna mendukung data primer ataupun datayang didapatkan dengan berbentuk dokumen, data sekunder digunakan

sebagai data yang menjadikan pendukung data primer dan menjadi penguat data utama yang telah dikumpulkan. Selanjutnya data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur maupun dokumen seperti PERBUP, data para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor dan data yang didapatkan melalui bacaan berbagai sumber terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah dan program terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor.

b) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Pengumpulan data penelitian melalui berdialog secara langsung dengan narasumber guna menggali informasi dari narasumber (Arikunto S. , 2006). Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data melalui pertanyaan secara langsung yang dilakukan guna menggali informasi secara mendalam dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian, dengan tujuan mendapatkan data yang akurat terkait Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19 dan program peningkatan kapasitas UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Bupati, Badan Usaha kecil dan Menengah Kab. Bogor, para pelaku UMKM yang ikut pelatihan peningkatan kapasitas UMKM di Kabupaten Bogor.

2. Dokumentasi

Penggunaan metode ini di pilih guna memperoleh data berbentuk pedoman maupun yang tercatat (Arikunto S. , 2003). Dokumentasi diperlukan penulis untuk memperoleh data dari mengkaji data yang berbentuk dokumen sah berbentuk lisan ataupun tulisan terkait permasalahan penelitian. Data yang dihasilkan metode dokumentasi seperti, Peraturan Bupati terkait pemulihan ekonomi UMKM, Pamflet terkait program pemulihan UMKM, foto-fotokegiatan

program peningkatan kapasitas UMKM dan lain sebagainya.

3. Observasi

Observasi atau disebut sebagai pengamatan, merupakan kegiatan yang dapat dijalankan dengan cara melakukan pengamatan dengan objek diteliti dengan didukung data informasi yang dimiliki (Arikunto S. , 2006). Observasi dilakukan penulis bertujuan menganalisa objek penelitian dengan tujuan memahami peristiwa dari pengetahuan maupun opini yang sudah terlihat guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan tindak lanjut pada tahap investigasi lapangan. Sasaran observasi penelitian ini adalah keadaan pemerintah Kabupaten Bogor, lingkungan, hubungan antar aktor kolaborasi, komunikasi politik bupati, sarana prasarana, hubungan bupati dengan bawahannya serta karakteristik bupati dan lainnya. Pada tahap observasi dilakukan pada objek tersebut, membantu penulis dalam mendukung data primer ataupun sekunder dalam melakukan penelitian di Kabupaten Bogor.

c) Teknik Analisis

Proses yang dilakukan adalah analisis data secara berkaitan satu dengan yang lain dan secara intensif sehingga mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, Teknik analisis interaktif yang digunakan oleh penulis Huberman dan Miles (dalam Idrus, 2009, hlm. 146-147) berpendapat bahwa terdapat 3 cara guna menganalisis data kualitatif yakni:

1. Reduksi Data

Pemilihan data pada penelitian merupakan proses mereduksi data melalui pemilihan unsur berkaitan dengan kebutuhan penelitian selama tahap meneliti terjadi. Selama proses reduksi data yang berjalan dengan berkelanjutan membuat tahap meneliti tidak menunggu terkumpulnya data, sehingga pada reduksi data mampu terlaksana saat tahap meneliti dilakukan sehingga menemukan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian, data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan menulis secara lebih rinci dengan fokus pada permasalahan yang sesuai

dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2017).

2. Penyajian Data

Apabila reduksi data sudah terlaksana, selanjutnya penyajian data ke dalam uraian singkat. Huberman dan Miles (dalam Idrus, 2009, hlm. 151) menjelaskan bahwa penyajian data menjadi kumpulan informasi yang terinci serta memberikan gambaran mengenai hasil penelitian secara terperinci dengan pemberian peluang dengan menarik simpulan dan pengambilan respon. Penyajian data hasil dari wawancara Bupati, Badan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bogor , serta para pelaku yang menjadi sasaran program pemulihan ekonomi UMKM. Selanjutnya data observasi yang dihasilkan secara langsung di lapangan oleh penulis, keseluruhan data akan dipahami secara terpisah yang kemudian akan disatukan serta ditarik kesimpulan sejalan dengan rumusan masalah penelitian.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari proses pengumpulan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Idrus (2009, hlm.151), berpendapat terkait penyimpulan mampu terlaksana ketika pengumpulan data terjadi, pembuatan simpulan guna simpulan akhir dikarenakan jika tahap penyimpulan penelitian telah terjadi, maka verifikasi hasil temuannya lapangan serta kesimpulannya melalui pertanyaan singkat dan mudah dipahami dalam penyimpulan dengan gambaran terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Bogor.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian.

BAB II: Teori

Bab ini memberikan penjelasan penelitian terdahulu, kerangka teori dari penulis pada penelitian ini, yakni teori milik Grindle terkait dengan faktor yang mendukung Implementasi kebijakan berjalan dengan lancar serta penggunaan metode penelitian.

BAB III: Lanskap Kabupaten Bogor

Bab ini menguraikan terkait gambaran umum tentang wilayah Kabupaten Bogor yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.

BAB IV: Jawaban dari Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19?

Pada bab ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemegang kekuasaan terhadap pemulihan ekonomi UMKM di wilayahnya pasca pandemi covid-19 dengan mengeluarkan peraturan yang bertujuan mengembalikan ekonomi UMKM di wilayah Kabupaten Bogor, seharusnya dengan ini pemerintah mampu menjamin keselamatan dan keamanan warganya dengan permasalahan yang terjadi.

BAB V: Jawaban dari Bagaimana Implementasi Kebijakan pemerintah terhadap program peningkatan kapasitas UMKM di Kabupaten Bogor?

Pada bab ini menjelaskan terkait pengimplementasian kebijakan yang telah dikeluarkan serta program pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM terhadap pemulihan dan transformasi UMKM di Kabupaten Bogor.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang di hasilkan dari pelaksanaan penelitian oleh penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai definisi konseptual dan teori sekaligus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis guna menunjang dalam menyelesaikan penelitian. Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis merupakan definisi yang sejalan serta berkaitan dengan napa yang menjadi inti atau fokus dalam penelitian, yaitu definisi mengenai implementasi kebijakan dan peningkatan kapasitas UMKM pasca pandemi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teori sekaligus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu teori implementasi kebijakan dari Grindle. Berikut pembahasan secara terperinci dalam definisi konseptual dan teori yang digunakan penulis dalam penelitian.

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dikatakan sebagai rangkaian konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan suatu konsep yang mendukung teori dalam penulisan. Dapat diartikan penulis menggunakan konsep Implementasi kebijakan yang terbagi menjadi dua konsep, yaitu Isi Kebijakan dan Implementasi lingkungan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Sejumlah ahli menjelaskan konsep implementasi. Meter dan Horn menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang

mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. (Meter & Horn, 1975).

Grindle dalam buku (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Implementasi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Secara esensial, implementasi juga melibatkan usaha untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Dalam konteks praktis, implementasi dapat dijelaskan sebagai proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang perlu dijalani (Mulyadi, 2015).

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan peundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit, dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Isi kebijakan menjadi salah satu hal yang sangat penting dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kemampuan institusi pemerintah

dan kompetensi aparatur, dan faktor eksternal seperti pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Grindle mengemukakan bahwa strategi yang tepat dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan juga mampu meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pandangannya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung kepada kebijakan itu sendiri, namun ada pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasi dan kondisi lingkungan sosial dan politik di sekitarnya (Wahab, 2012). Implementasi kebijakan memiliki faktor yang mampu mempengaruhinya keberhasilan kebijakan tertentu, hal ini dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Kemudian melihat bagaimana pelaksana kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya (*design*) berdasarkan pada aksi kebijakan yang dilakukan (Setiawan, 2023).

Kebijakan di dalam teori Grindle meliputi kepentingan yang dipengaruhi: tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Selain itu, konteks implementasi mencakup berisi di dalamnya hal-hal seperti kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut.

B. Teori Penelitian: Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi. Lebih dari itu, implementasi juga melibatkan isu-isu konflik dan keputusan tentang siapa yang mendapatkan apa dari suatu kebijakan. Selanjutnya implementasi kebijakan memiliki dua konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Isi kebijakan dan Implementasi Lingkungan. Kedua konsep ini memberikan definisi terperinci tentang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kebijakan (Grindle, 1980). Pada gambar 2.1 terlihat jelas bahwasanya kebijakan memiliki suatu tujuan

yang jelas sebagai nilai kebijakan. Dalam merancang dan mendanai, tujuan implementasi kebijakan dirumuskan ke dalam program aksi dan proyek tertentu. Pelaksanaan program atau pengaruh program secara keseluruhan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Evaluasi keseluruhan implementasi kebijakan melibatkan pengukuran luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Dampak terhadap sasaran, baik individu maupun kelompok masyarakat, menjadi fokus dalam melihat luaran program implementasi. Perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran dianggap sebagai hasil dari implementasi kebijakan (Akib, 2018).

Penulis mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle untuk mengavaluasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pemulihan ekonomi usaha mikro keil menengah (UMKM) pasca covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020. Dalam teori Grindle, terdapat dua variable indicator yang menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan.

1. Konten Kebijakan

- a. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.
- b. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan
- c. Perubahan yang diinginkan
- d. Posisi atau jabatan pembuat kebijakan
- e. Identitas pelaksana program
- f. Sumber daya pendukung

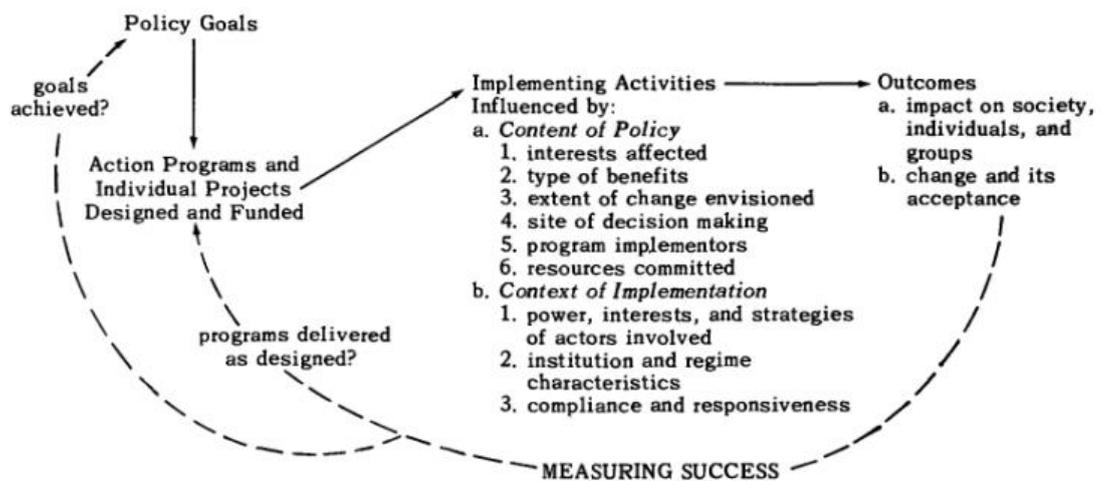
2. Konteks Implementasi

- a. Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Tingkat kepatuhan dan respon terhadap kebijakan

Berikut merupakan gambar dari pemikiran Grindle yang akan digunakan

dalam pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan sesuai dengan indikator yang telah disebutkan.

Figure 1-1. Implementation as a Political and Administrative Process



Gambar 2 1: Skema Pemikiran Grindle

Beberapa tokoh telah mengemukakan pandangan mereka mengenai pendekatan implementasi kebijakan, di antaranya Merilee S. Grindle. Grindle berpendapat bahwa kesuksesan implementasi kebijakan tergantung pada substansi dan kontennya, serta ditentukan oleh tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

- 1) Konten pesan kebijakan, yang mencakup:
 - a. Ketersediaan dana dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan kebijakan;
 - b. Sanksi yang ada;
 - c. Tingkat ketidaktahuan tentang isu kebijakan.
- 2) Kredibilitas pesan kebijakan, yang terdiri dari:
 - a. Keterangannya yang jelas;

- b. Keselarasan pesan kebijakan;
- c. Seberapa sering pesan kebijakan diulang;
- d. Diterimanya pesan oleh pihak-pihak terkait.

3) Bentuk kebijakan, yang melibatkan: a) Efisiensi kebijakan; b) Partisipasi masyarakat; c) Jenis kebijakan yang digunakan.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle bergantung pada konsen atau isi program dan konteks pelaksana kebijakan.

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, terdapat beberapa pihak yang terlibat mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok. Kepentingan ataupun kepentingan-kepentingan lainnya berperan penting dalam berbagai aspek implementasi kebijakan, dari pendaan sampai pada pelaksanaannya.

2. Tipe Manfaat

Pada tahap implementasi kebijakan, upaya yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat, baik itu dampak positif maupun negatif, yang akan mempengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut mengartikan, manfaat kebijakan diharuskan memiliki beberapa jenis manfaat yang memberikan dampak positif pada kebijakan yang dilaksanakan, tahap ini mampu menjadikan pendorong pada pelaksanaan kebijakan dan menjadifokus tujuan pada suatu kebijakan.

3. Derajat perubahan yang dingin dicapai

Pada suatu kebijakan, memiliki tujuan tertentu yang dingin dicapai. Pada implementasi kebijakan maka diperlukan ukuran yang jelas terkait dengan perubahan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Kebijakan

diharapkan mampu menghasilkan perubahan, sehingga harus memiliki target yang jelas mengenai seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan pada pembuatan kebijakan di fokuskan lebih kepada menyelesaikan permasalahan yang nantinya diharapkan mampu memberikan perubahan.

4. Letak pengambilan keputusan

Pada tahap ini menjelaskan lokasi dimana keputusan dapat diambil dalam sebuah kebijakan yang akan dijalankan. Tujuan utamanya adalah bagaimana untuk mencegah adanya tumpang tindih terhadap pengambilan keputusan. Sehingga pada prosesnya sangat penting dalam hal ini adalah setiap keputusan yang diambil diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat serta arah perubahan yang jelas Ketika kebijakan itu dijalankan.

5. Pelaksanaan program

Dalam melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pelaksana yang kompeten dan terampil yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan program menjadi bagian penting didalam implementasi kebijakan hal ini dikarenakan bertanggung jawab terhadap menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sehingga bukan hanya pembuat kebijakan yang melaksanakan kebijakannya, namun perlu adanya dukungan dari masyarakat, sektor swasta, LSM, dan pihak lainnya.

6. Sumber daya yang digunakan

Pada tahapan ini, hal yang sama berlaku seperti pada tahap sebelumnya, dimana implementasi harus didukung oleh sumber daya yang menjadikan implementasi yang efisien. Sumber daya disini tidak hanya merujuk kepada sumber daya manusia, tetapi juga jenis sumber daya lainnya. Dukungan sumber daya yang memadai bertujuan dalam menjamin pelaksanaan kebijakan

yang baik sehingga mampu menjadikan tujuan kebijakan tercapai. Hal lain seperti pada aspek sumber daya juga mencakup berbagai jenis sumber daya lainnya, sumber daya keuangan dan fasilitas yang mendukung sebagai contohnya sehingga mampu mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementasi*)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam sebuah kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Faktor kekuatan, kepentingan, hingga strategi yang digunakan oleh aktor harus mampu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidakkeseimbangan kekuatan antara aktor dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kebijakan tersebut dikuasai oleh aktor yang lebih kuat.

2. Karakteristik lembaga

Pada lingkungan tempat kebijakan dijalankan mempengaruhi keberhasilannya, sehingga pada bagian ini menjelaskan bagaimana karakteristik dari suatu institusi yang juga mampu mempengaruhi kebijakan. *Regime* yang berkuasa berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga adanya kedua faktor tersebut tidak mampu diperhatikan dengan baik, maka tidak semua kebijakan mampu diimplementasikan dengan mulus. Karakteristik dari suatu institusi mengacu kepada lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat juga mempengaruhi keberhasilan atau lembaga dimana kebijakan tersebut diterapkan.

3. Tingkat Kepatuhan dan adanya respon pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan, kepatuhan dan respon pelaksana sangat penting untuk dipertimbangkan. Pada poin ini menjelaskan seberapa patuhnya dan responsifnya pelaksana dalam merespon suatu kebijakan. Konsistensi pelaksana dalam implementasi kebijakan juga dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut Grindle (Grindle, 1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama:

1. Isi kebijakan dan konteks Implementasi. Dalam isi kebijakan, terdapat beberapa faktor seperti kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, perubahan yang diinginkan, posisi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan dalam konteks implementasi kebijakan, faktor yang memainkan peran mencakup kekuasaan, kepentingan, serta strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta tingkat kepatuhan dan respon terhadap kebijakan.
2. Dampak (*impact*), yang melibatkan manfaat dari program dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam konteks keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan memiliki tiga faktor yang mampu menyebabkan keberhasilan terjadi:

- a) Kepatuhan terhadap pimpinan.
- b) Kelancaran aktivitas dan minimnya masalah yang timbul akibat adanya kebijakan.
- c) Mencapai kinerja yang memuaskan seluruh pihak.

Sementara itu, tiga faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan:

- a) Adanya Isu kebijakan yang beredar tidak jelas, hal tersebut termasuk kurang tegasnya pihak internal maupun eksternal yang menunjukkan adanya kekurangan sumber daya pendukung implementasi kebijakan.
- b) Kekurangan informasi yang mengakibatkan gambaran kebijakan kurang tepat sasaran, sehingga pelaksana kebijakan tidak mampu mendapatkan informasi yang cukup tentang isi kebijakan dan hasil dari implementasi kebijakan yang diharapkan.
- c) Kurangnya dukungan dari seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan.

BAB III

LANDSKAP KABUPATEN BOGOR DAN KEBERADAAN UMKM

A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor

1. Sejarah Umum Kabupaten Bogor

Ada beberapa pendapat bahwa nama Bogor berasal dari nama resmi Penjajah Belanda, "Buitenzorg." Pendapat lain mengatakan bahwa Bogor berasal dari kata "Bahai", yang berarti sapi, karena ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Ada juga pendapat ketiga yang mengatakan bahwa Bogor berasal dari "Bokor", yang berarti tunggul (kawung) pohon enau. Nama Bogor juga disebutkan dalam dokumen pada 7 April 1952, disebutkan sebagai "Hoofd Van de Negorij Bogor", yang berarti sekitar "Kepala Kampung Bogor." Kemudian diketahui bahwa Kampung Bogor terletak di lokasi Kebun Raya Bogor, yang dibangun pada tahun 1817. Penggabungan sembilan kelompok pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745 menciptakan masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih besar. Komponen utama masyarakat Kabupaten Bogor adalah kesatuan (Bogorkab, 2019).

Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong (Bogorkab, 2019).

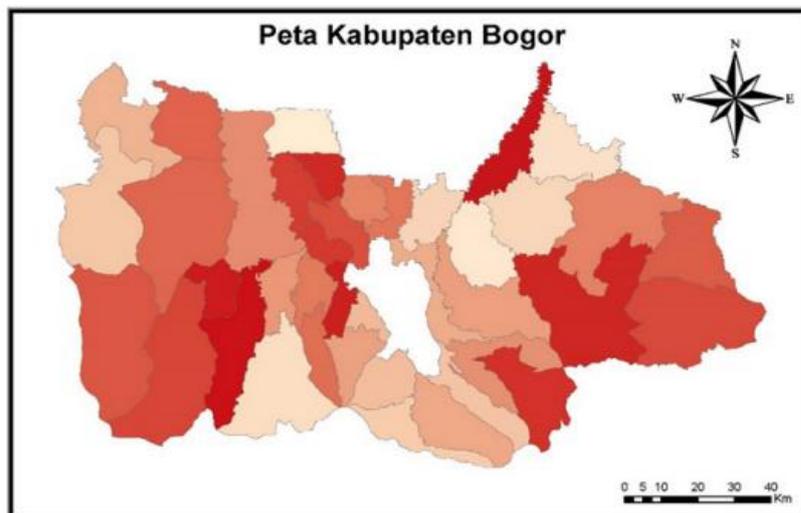
2. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan nama Kabupaten yang terdapat di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan observasi langsung secara geografis Kabupaten Bogor menjadi bagian dari Jawa Barat. Jarak dari Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Jawa Barat 210,8 km. Kabupaten Bogor memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 2. 710,62 km². yang terdiri dari 40 Kecamatan.

Gambar 3 1

Peta Kabupaten Bogor



Sumber: (Bogorkab, 2019)

Secara demografis, keadaan penduduk di wilayah Kecamatan Cileungsi berdasarkan dari data kecamatan pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sejumlah 5.556.838 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 2.859.683 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.707.155 jiwa. Jumlah penduduk tiap kelompok umur kebanyakan ialah usia remaja sampai dewasa, yaitu rentan umur 15-50 tahun. Kelompok pada rendah usia tersebut memiliki perbandingan cukup seimbangan perbandingannya.

Tabel 3 1**Tabel Penduduk Berdasarkan Umur**

Kelompok Umur	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	236 879	266 456	463 353
5-9	236 245	225 505	461 750
10-14	234 037	220 016	454 053
15-19	244 355	229 245	473 600
20-24	256 408	238 807	495 215
25-29	255 896	241 386	497 282
30-34	257 769	242 832	500 601
35-39	231 050	215 702	446 752
40-44	213 640	205 112	418 752
45-49	191 450	182 212	373 662
50-54	161 297	151 845	313 142
55-59	125 842	117 383	243 225
60-64	91 948	86 911	178 859
65-69	61 552	57 245	118 797
70-74	35 419	30 705	71 124
75+	25 878	30 793	56 671
Kabupaten Bogor	2 859 683	2 707 155	5 566 838

Sumber: (Bogorkab, 2019)

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk Kabupaten Bogor antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang, tidak terdapat selisih yang cukup jauh tentunya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Kabupaten Bogor, karena adanya keseimbangannya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sehingga tidak memunculkan dominasi dalam masyarakat. Keseimbangan penduduk ini akan membuat partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi juga akan lebih baik. Pendudukan Kabupaten Bogor mayoritas remaja sampai dewasa dengan rentang umue 15-50 tahun, hal tersebut tentunya menjadikan keuntungan bagi wilayah Bogor, dikarenakan memiliki mayoritas penduduk dengan usia produktif yang dominan, sehingga menjadikan memaksimalkan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik dan efisien, maka tentu akan mempermudah segala aspek demi kemajuan daerah terutama pembangunan ekonomi pasca pandemi.

Kemudian dalam tingkat Pendidikan dari banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, wilayahnya memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai dan meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini berdasarkan banyaknya sekolah hingga perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut, menjadikan akses pendidikan penting untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan bonus demografi manusia yang banyak. Berikut merupakan data banyaknya bangunan sekolah yang dimiliki, hal ini menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor dari segi infrastruktur sangat memadai, tentu hal tersebut memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi.

Tabel 3 2

Tabel Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Fasilitas Pendidikan		
	2019	2020	2021
SD	435	435	435
SMP	395	399	399
SMA	208	219	214
SMK	217	225	228
Perguruan Tinggi	48	52	52

Sumber: (Bogorkab, 2019)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persebaran infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun meningkat, hal ini terlihat dari jumlah bangunan pendidikan yang di dirikan sehingga dengan adanya bangunan pendidikan yang menyebar mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan, hal itu tentu mempengaruhi berfikir kritisnya masyarakat. Sehingga ketika pemerintah wilayahnya melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak terhadap kebijakan yang dikeluarkan maka aka nada yang memberikan kritik ataupun saran, hal tersebut mampu membuat pemerintah wilayah akan terus berfikir bahwa semua yang mereka lakukan akan mempengaruhi masyarakatnya. Terlebih akan memicu peningkatan ekonomi,

dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan persebaran pendidikan yang merata.

3. Struktur Sosial Politik Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang mayoritas orang sunda. Berdasarkan hasil observasi langsung, struktur masyarakat Bogor jika dilihat dari segi etnis mayoritas berasal dari etnis sunda, tionghoa dan dikarenakan berkembangnya zaman, banyaknya etnis jawa yang kemudian berdatangan untuk bermukim di wilayah ini. Sedangkan dari segi agama, masyarakatnya mayoritas beragama islam, namun tidak sedikit juga pemeluk agama nasrani.

Tabel 3 3

Data Fasilitas Tempat Ibadah

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	2 723
Gereja	16
Pura	17
Vihara	18

Sumber: (Bogorkab, 2019)

Dikarenakan beragamnya keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya, namun dengan mayoritas pemeluk agama islam rumah ibadah yang tersebar kebanyakan masjid dan mushola, sedangkan penduduk beragama non-muslim tidak sedikit juga rumah ibadahnya di Kabupaten Bogor. Dengan beragamnya penduduk yang memeluk keyakinan yang berbeda, toleransi terhadap agama minoritas sangat baik, ini terlihat bahwa masyarakatnya berjalan dengan damai dalam kehidupan beragama dengan menjaga toleransi dan tidak adanya konflik antar agama.

4. Struktur Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil observasi langsung, kebanyakan masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan yang ada dalam lingkungannya masing-masing dalam kehidupan di masyarakat. Dimana keutuhan yang sangat dekat terjadi dengan kekerabatan, yaitu kedekatan keluarga inti dan kerabat lainnya. Dengan masyarakat yang beragam dan berkembangnya teknologi kemudian memudahkan masyarakat dalam berorganisasi pada tingkat kecamatan, dapat dilihat dari berjalannya organisasi pada tingkat kecamatan dan acara gotong royong yang setiap bulan di adakan oleh pihak kecamatan untuk masyarakat sekitar, antusias masyarakat memeriahkan dan ikut serta dalam acara cukup baik. Organisasi masyarakat masih berjalan cukup baik seperti, karang taruna, PKK, kelompok UMKM, maupun Majelis Ta'lim. Meskipun dengan kesibukan dalam bekerja organisasi tersebut masih berjalan cukup baik, hal itu di mudahkan dengan perkembangan teknologi yang makin canggih sehingga pertemuan-pertemuan bisa dilakukan secara daring.

Sarana perdagangan yang bertujuan meningkatkan potensi ekonomi daerah cukup merata, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, terdapat beberapa Kecamatan yang tidak memiliki infrastruktur bangunan seperti pasar yang menunjang transaksi ekonomi dalam hal ini perdagangan. Di tengah kehidupan yang semakin berkembang, terlihat jelas bahwa fasilitas pasar dan pertokoan menjadi titik sentral di Kabupaten Bogor yang pemererat perekonomian warganya (diskopukm, 2020).

Tabel 3 4
Data Fasilitas Perdagangan

Fasilitas Perdagangan	Jumlah
Ruko	104
Kios	11.455
Los	6.783
Pedagang	16.159

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, keadaan sarana perdagangan di Kabupaten Bogor sangat memadai, meskipun menurut data yang di dapat masih ada dua kecamatan yang tidak memiliki sarana perdagangan. Terlihat jelas bahwa di dominasi oleh kelompok pedagang yang menyebar untuk kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Tentunya dengan penyebaran sarana fasilitas yang memadai membuat masyarakat mampu meningkatkan potensi ekonomi di wilayahnya. Dalam segala hal, pasar di kecamatan ini telah menjadi bukti nyata bagaimana fasilitas sederhana dapat berkembang menjadi pilar utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang merata. Kehadirannya tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi panggung bagi interaksi sosial, budaya, dan kemajuan komunitas setempat.

Kemudian berdasarkan observasi langsung, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat industri dan pusat pergerakan ekonomi, mendapati dirinya terperangkap dalam keadaan yang kacau. Fasilitas pasar yang dulu merupakan jantung pulsasi ekonomi, kini hanya berdengung lemah. Pedagang-pedagang kecil yang tergabung dalam Forum UMKM menatap masa depan dengan kekhawatiran yang mendalam, karena omset yang dulu mengalir deras, kini terhenti dalam lesu.

Di tengah perjalanan peningkatan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Bogor, suatu perjalanan yang telah menyaksikan banyak perubahan dan tantangan, datanglah cobaan yang begitu tak terduga. Sebuah bayangan gelap

yang dikenal sebagai covid-19 menyapa tanpa mengenal waktu dan tempat, mengguncang fondasi kehidupan dan perekonomian yang telah dibangun dengan susah payah. Namun, di balik semua kesulitan ini, Kabupaten Bogor menunjukkan karakter tangguhnyanya. Meskipun terdampar oleh badai yang ganas, semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakatnya tidak pernah surut. Warga dan pelaku usaha saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mencari jalan keluar bersama. Mereka berusaha menemukan cara baru untuk beradaptasi, menghadirkan kreativitas dalam kesulitan, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar (Prasetya, 2020).

Dalam observasi langsung ini, Kecamatan Cileungsi menjadi gambaran nyata bagaimana ketahanan suatu komunitas diuji oleh krisis yang melanda. Perekonomian yang sebelumnya bersinar kini melalui fase gelap, namun di tengah kegelapan itu tumbuh harapan baru. Dengan semangat untuk bangkit, para pelaku usaha UMKM dan pemerintah setempat bersama-sama merangkai Langkah menyusun kembali ekonomi daerah yang lebih kuat.

B. Gambaran Umum UMKM Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil observasi langsung, kondisi UMKM Kabupaten Bogor baik dalam organisasi maupun perputaran ekonomi daerah masih kurang maksimal, ini dapat dilihat dari bagaimana kontribusi pelaku usaha ini terhadap ekonomi daerah. UMKM di Kabupaten Bogor meliputi beragam sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan tangan, pertanian, dan jasa, yang memberikan sentuhan khas pada kisah ekonomi lokal. Setiap pagi, suasana di sekitar pusat-pusat perdagangan dipenuhi dengan kegiatan yang penuh semangat. Pedagang dengan wajah penuh harap menata produk-produk unik mereka di lapak-lapak sederhana, siap untuk bertemu dengan pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 3 5
Data Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor

Kategori Usaha	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Aksesoris	1.179
Batik	1.179
Bordir	168
Craft	42.097
Fashion	41.087
Konveksi	25.090
Kuliner	181.187
Makanan	123.523
Minuman	24.585
Jasa/Lainnya	57.252

Sumber: (diskopukm, 2020)

Di tengah perjalanan peningkatan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Bogor, suatu perjalanan yang telah menyaksikan banyak perubahan dan tantangan, datanglah cobaan yang begitu tak terduga. Sebuah bayangan gelap yang dikenal sebagai covid-19 menyapa tanpa mengenal waktu dan tempat, mengguncang pondasi kehidupan dan perekonomian yang telah dibangun dengan susah payah. Namun, di balik semua kesulitan ini, Kabupaten Bogor menunjukkan karakter tangguhnyanya. Meskipun terdampar oleh badai yang ganas, semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakatnya tidak pernah surut. Warga dan pelaku usaha saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mencari jalan keluar bersama. Mereka berusaha menemukan cara baru untuk beradaptasi, menghadirkan kreativitas dalam kesulitan, dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Kesulitan ekonomi pelaku UMKM itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Bagian Pembangunan Kecamatan Cileungsi Yayuk Dewi, mengungkapkan bahwa,

“Itu semua terjadi disemua sektor, pelaku usaha itu yang jelas kena dampaknya paling parah. Mereka gaada pemasukan karena gabisa jualan, mau jualan juga gaada yang beli, belum lagi bayar sewa ruko. Banyak yang akhirnya bangkrut karena pandemi kemarin.”

(wawancara Juli 2023).

Di sini dapat terlihat bahwa potret yang terjadi dengan imbasnya covid-19 membuat sektor UMKM mengalami dampaknya, mereka seperti terjebak dalam pusaran ketidakpastian yang mengancam eksistensi usaha mereka. Tidak adanya pemasukan karena pembatasan sosial berskala besar membuat sumber pendapatan utama para pelaku usaha mengering, dan ruko yang mereka sewa tetap harus dibayarkan, menjadi beban tambahan yang menekan mereka. Di tengah kesulitan ini, banyak pelaku usaha di Kabupaten Bogor berjuang untuk bertahan. Mereka mencari cara kreatif untuk mengatasi tantangan, seperti berkolaborasi dengan pelaku usaha lain atau beralih ke model bisnis online. Namun, perjuangan mereka tetaplah berat, dan tidak semua berhasil mengatasi krisis ini.

Gambar 3 2

Gambar Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor



“Karena pemasukan utama saya mah jualan ya a, jadi mau ga mau harus tetep jualan. Di akalin aja sama temen buat nyewa tempatnya gabungin, jadi saya pancongnya jualan pagi sampe siang kadang sampe sore, temen saya ngelanjutin dari sore sampe malem, lumayan kadang ada aja yang beli mah” (wawancara 1 Juni 2023).

Gambar serta hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwasanya adanya semangat pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bogor yang tetap bertahan selama masa pandemi, meskipun menghadapi tantangan berat mereka menunjukkan tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Tindakan ini juga menggambarkan bagaimana adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan bisnis, yaitu langkah cerdas yang di ambil dalam berkolaborasi engan teman untuk berbagi tempat usaha. Dengan cara ini, mereka dapat memaksimalkan penggunaan tempat dan meningkatkan peluang penjualan. Dengan pemisahan waktu antara pagi dan sore, mereka menciptakan layanan yang lebih berkesinambungan bagi pelanggan.

Namun, meskipun upaya ini sangat dihargai, wawancara ini juga menggaris bawahi pentingnya dukungan lebih lanjut bagi pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi. Usaha keras dan inovasi individual sangat penting, tetapi perlu juga ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar sektor UMKM dapat pulih dan berkembang kembali. Pandemi ini telah mengajarkan kita betapa pentingnya saling bantu-membantu dan bersatu untuk menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa ini.

BAB IV

PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR

Dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19 seluruhnya sangat dipengaruhi oleh aktor utama, yaitu Bupati. Dalam hal ini, pemerintah daerah ketika membuat kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan dan bertindak dengan cermat. Dalam mendukung hal tersebut pemerintah harus mampu memperhatikan konsep yaitu Isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Dalam teori Implementasi Kebijakan dijelaskan bahwasanya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan yang dipengaruhi seperti tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Selain itu, konteks implementasi mencakup berisi di dalamnya hal-hal seperti kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap (Grindle, 1980).

Segala bentuk upaya dalam percepatan dan transformasi ekonomi Kabupaten Bogor dilakukan bersama-sama, Percepatan dan transformasi ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, UMKM, dan berbagai pihak terkait lainnya. Upaya bersama mencakup pelatihan, peningkatan akses ke dana, pemasaran produk, dan peningkatan infrastruktur, seperti jalur kereta api dan teknologi. Pemerintah daerah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk membangun kemitraan yang menguntungkan, menemukan peluang pasar baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka regulasi yang mendukung. Diharapkan UMKM di Kabupaten Bogor dapat berkembang dan berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja melalui metode ini.

A. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19

Pemerintah Kabupaten Bogor secara responsif melakukan berbagai upaya dalam memulihkan ekonomi daerah terskhusus UMKM, Hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu adanya penyusunan peraturan skala prioritas program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang (diskopukm, 2020). Secara cepat kemudian Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk satuan tugas dalam percepatan dan transformasi ekonomi daerah yang terdampak pandemi covid-19, kebijakan jangka pendek yang dimaksud yaitu pemberian bantuan langsung kepada pelaku usaha yang terdampak sesuai dengan peraturan bupati yang telah ditetapkan untuk membantu para pelaku usaha. Kebijakan jangka menengah yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi UMKM yaitu dengan membuat program pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro melalui program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, dan kebijakan jangka panjang yang dilakukan dalam proses pemulihan ekonomi usaha mikro yang terdampak yaitu dengan melakukan pemberdayaan digital dalam mengadopsi teknologi pada bisnis mikro, dan pengembangan infrastruktur ekonomi (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwasanya pemerintah Kabupaten bogor melakukan segala upaya percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi daerah sebagai dampak pandemi covid-19 dengan membentuk satuan tugas pemulihan ekonomi daerah yang di pimpin oleh Wakil Bupati, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 360/352/Ktsp/Per-UU/2021 tentang pembentukan satuan tugas pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Bogor (diskopukm, 2020).

1. Dasar – dasar hukum program

Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19 di Kabupaten Bogor yang menjadi landasan legal dari kebijakan yang akan diterapkan. Dalam kegiatan studi lapangan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan bahwa ada dasar hukum kebijakan yaitu:

a) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan peraturan hukum yang isinya tentang seluruh kepala daerah membentuk satuan tugas guna percepatan penanganan covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 memiliki tujuan utama:

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk merespons dan mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang melibatkan aspek penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dianalisis dari peraturan presiden tersebut:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup:

Menyelidiki tujuan utama peraturan presiden untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang fokus kebijakan yang diambil.

Menganalisis ruang lingkup peraturan untuk menentukan sejauh mana cakupan dan keterlibatan Komite Penanganan Penyebaran Covid-19 dalam pemulihan ekonomi nasional.

2. Struktur dan Komposisi Komite:

Menilai struktur dan komposisi Komite Penanganan untuk memahami partisipasi dan peran dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

3. Langkah-langkah Penanganan Covid-19:

Meneliti langkah-langkah konkret yang diambil dalam penanganan penyebaran Covid-19, seperti kebijakan kesehatan masyarakat, pembatasan sosial, dan upaya-upaya lainnya.

4. Program Pemulihan Ekonomi:

Menganalisis program dan kebijakan ekonomi yang diusulkan atau dijalankan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung sektor-sektor yang terdampak dan upaya-upaya pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

5. Koordinasi dan Sinergi dengan Pihak Terkait:

Meneliti mekanisme koordinasi antara Komite Penanganan dan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

6. Sumber Daya dan Anggaran:

Mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

7. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi:

Meneliti mekanisme yang ditetapkan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang arah dan efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi Covid-19, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

b) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 475.5/Kep.51-Hukham/2020 tentang komite kebijakan penanganan Coronavirus Disease 2019 dan pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat

Melalui Surat Keputusan Gubernur tersebut menjelaskan pembentukan dari komite penanganan covid-19 terkait dengan masalah kesehatan dan ekonomi daerah, hal tersebut sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan melalui penjelasan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, seluruh kepala daerah di Jawa Barat membentuk komite tugas dalam percepatan ekonomi daerah pasca pandemi.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut memiliki tujuan utama:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan pasca covid-19 di wilayah Jawa Barat.
2. Meningkatkan percepatan Ekonomi Daerah melalui pembentukan satuan komite yang dibentuk di tingkat Provinsi
3. Memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

c) Keputusan Bupati Nomor 360/352/Ktsp/Per-UU/2021 tentang pembentukan satuan tugas pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Bogor

Surat Keputusan Bupati Nomor 360/352/Ktsp/Per-UU/2021 tentang pembentukan satuan tugas pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya berisikan pembagian tim percepatan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor. Keputusan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 360/352/Ktsp/Per-UU/2021 menandai langkah penting dalam upaya pemulihan ekonomi daerah di tengah tantangan yang dihadapi akibat pandemi. Keputusan tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak ekonomi yang

dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Dengan membentuk satuan tugas khusus, diharapkan akan terwujud koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait untuk merancang dan melaksanakan program-program pemulihan ekonomi yang tepat sasaran.

Struktur dan komposisi satuan tugas menjadi hal krusial dalam mencapai kesuksesan pemulihan ekonomi. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dan sinergi dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, langkah-langkah konkrit yang diambil dalam kebijakan, koordinasi efektif, alokasi sumber daya yang memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memulihkan ekonomi daerah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Bogor melakukan segala upaya percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi daerah sebagai dampak pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan langsung tunai sesuai dengan Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2020 tentang pemberian bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dan korban pemutusan hubungan kerja yang terdampak covid-19 dalam upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor. Seluruh peraturan percepatan tersebut melihat dari segi isi kebijakan dan juga lingkungan kebijakan. Hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu adanya penyusunan peraturan skala prioritas program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dari hasil wawancara dengan Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, Mengungkapkan bahwa,

“Kami sudah ditugaskan sesuai SK yang dikeluarkan oleh Bupati yang langsung berkaitan perihal percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi yang kemudian dibentuk satgasnya, yang keseluruhan intinya itu peraturan-peraturan yang tujuannya memulihkan ekonomi di Kabupaten Bogor dengan tiga skala prioritas kami itu dari program jangka pendek semacam bantuan tunai sampai kepada program jangka panjang itu legalitas dagang, semua peraturan yang disusun oleh satuan tugas melihat

juga karakteristik dan kesulitan ekonomi diberbagai tempat yang semuanya terpuruk tapi problemnya beda-beda” (Nuriyanti, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya pihak pemerintah daerah merespon dengan cepat terkait dengan pemulihan ekonomi di wilayahnya, dengan langsung membuat satuan tugas percepatan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19. Dengan adanya satgas yang dibentuk bertujuan dalam merumuskan peraturan yang tujuannya menghidupkan Kembali ekonomi di wilayah tersebut, serta adanya tiga skala prioritas yang menjadi fokus utama dari satgas sendiri yaitu program jangka pendek, seperti pemberian bantuan tunai kepada para pelaku usaha. Prioritas kedua yaitu program jangka menengah, yang mencakup aspek-aspek seperti legalitas dalam dunia usaha, serta prioritas jangka panjang yang melibatkan kebijakan ekonomi yang lebih luas.

Seluruh peraturan yang disusun oleh satuan tugas tentunya memperhatikan karakteristik dan kesulitan ekonomi yang berda-beda di berbagai lokasi di Kabupaten Bogor. Meskipun semua wilayah tersebut mengalami tekanan ekonomi yang signifikan akibat pandemi, tantangan yang dihadapi bisa berbeda-beda. Langkah-langkah yang diambil akan disesuaikan dengan masalah yang spesifik di masing-masing tempat untuk mencapai pemulihan ekonomi yang efektif dan adil di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Selanjutnya Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, menambahkan bahwa,

“selain kami pihak pemerintah daerah merumuskan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi, kami punya tugas menyelesaikan bersama-sama permasalahan pelaksanaan pemulihan ekonomi, kita juga tetap melakukan pengawasan karena itu semua harus ada laporannya kan” (Nuriyanti, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Sub bagian Usaha dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa,

“Sesuai arahan Bupati tentang satgas percepatan dan transformasi ekonomi daerah, seluruh dinas-dinas terkait turut ambil bagian dalam hal ini, bergandengan tangan untuk ekonomi Kabupaten Bogor pulih dalam situasi pasca pandemi” (Setiawan, 2023).

Kemudian sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Pembentukan satuan tugas melibatkan banyak pihak termasuk kami sebagai dinas terkait dengan usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif yang terlibat dalam pemulihan dan transformasi ekonomi mikro yang tujuannya kan itu kan, gimana caranya kami merancang pengembangan, membangun kemitraan usaha supaya itu mendorong pulihnya ekonomi di bidang UMKM” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tiga tokoh tersebut, menunjukkan bahwasanya peran pentingnya satuan tugas dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, tentu keterlibatannya tidak hanya dalam merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi saja, bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi bagian tugasnya. Dalam konsep implementasi kebijakan yaitu *content of policy* mengatakan adanya kepentingan-kepentingan didalam ruang perumusan kebijakan menjadi pengaruh pengambilan keputusan, sehingga diharapkan pemerintah mampu mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya terkhusus UMKM sehingga kebijakan yang dikeluarkan baik untuk ekonomi daerah.

Hal tersebut yang mendasari peran pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas, Pengawasan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan-laporan berkala menjadi alat penting untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi langsung yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa, dalam prosesnya segala upaya yang dilakukan termasuk dengan adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan dinas UMKM senilai Rp 1,2 juta yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar 15,24 Triliun yang terserap 99,2% dari jumlah nilai yang dianggarkan 15,36 triliun. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2020 tentang pemberian bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dan korban pemutusan hubungan kerja yang terdampak pandemic covid-19 dalam upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor (Peraturanbpk, 2020). Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, mengungkapkan bahwa,

“Memang betul sesuai dengan arahan bapak (Bupati) adanya bantuan langsung tunai itu bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor karena terkena dampak dari pandemi, itu menjadi salah satu upaya kami memulihkan ekonomi daerah khususnya di bidang usaha mikro” (Nuriyanti, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Sub Bagian Usaha Penanaman Modal Kabupaten Bogor Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa,

“Bantuan itu bentuk apresiasi pemerintah kepada para pelaku usaha, kami sadar bahwa pemberian bantuan berbentuk uang saja tidak cukup karena hanya akan bertahan tidak lama, tentu langkah berikutnya adalah memberikan pembinaan mental dan skill yang berguna ke depannya” (Setiawan, 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara dua tokoh tersebut, menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki kesadaran akan pentingnya antara bantuan tunai langsung dan peningkatan keterampilan dalam mendukung berkembangnya

UMKM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut mencerminkan pendekatan holistik dalam mendukung pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi, dengan tujuan agar memastikan keberlanjutan usaha mikro di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam mendukung keberlangsungan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Untuk pelaku usaha yang nerima itu mereka wajib mendaftarkan diri dulu terus lengkapi beberapa dokumen sebagai syarat penerimaan sehingga kita punya data berapa banyak UMKM yang memang terdaftar untuk penerimaan data bantuan ini, dan syarat pentingnya mereka belum pernah nerima bantuan sebelumnya jadi gabisa dua kali yang terpenting mereka bukan yang sedang nerima kredit usaha rakyat, nah itu gaboleh juga” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya proses yang terstruktur dalam penerimaan bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM di Kabupaten bogor, Proses pendaftaran dan pengumpulan dokumen yang dijelaskan oleh narasumber menunjukkan adanya upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Dengan meminta pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen yang diperlukan, pemerintah dapat memiliki data yang akurat tentang jumlah UMKM yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkannya.

Hal tersebut memiliki pendekatan yang hati-hati dan transparansi dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM, hal ini bertujuan dalam memastikan bantuan tersebut mencapai kepada mereka yang

membutuhkannya dan sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi daerah jangka pendek. Pendekatan ini pula meningkatkan akseptabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bogor.

2. Proses Pemulihan Ekonomi UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwasanya upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemulihan dan transformasi ekonomi UMKM pasca pandemi bukan sekedar hanya memberikan bantuan langsung tunai yang sifatnya hanyalah sementara, program jangka panjang seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan para pelaku usaha diperhatikan untuk mendorongnya sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan program jangka panjang yang dilakukan terstruktur dengan sangat baik. Dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Kami Dinas UMKM fokus kepada program jangka panjang yang bukan tentang pemberian bantuan saja tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan para pelaku usaha sehingga bukan hanya dalam bentuk uang tapi ilmu yang sekarang ini kita jalankan, itu dirasa berguna bagi para pelaku usaha, jadi kami sering sekali untuk membuat beberapa pelatihan yang sasarannya pelaku usaha” (Djayana, 2023).

Selanjutnya hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, menambahkan bahwa,

“Arahan langsung dari bapak Bupati yang kemudian disampaikan kepada dinas UKM dan dinas pariwisata tentang pemulihan ekonomi daerah, beberapa kebijakan dan program yang dibuat oleh dinas terkait lebih ke arah peningkatan skill mereka, bantuan yang diberikan jelas itu sifatnya sementara mungkin hanya bertahan beberapa minggu selebihnya yang mereka butuhkan saat ini meningkatkan kemampuan para pelaku usaha

dalam rangka pemulihan ekonomi daerah khususnya ekonomi UMKM” (Nuriyanti, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari dua tokoh tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian lebih kepada kebijakan yang sifatnya jangka panjang dengan meningkatkan kemampuan menjadikan sumber daya yang berkualitas tercipta bukan hanya sekedar melakukan pemberian bantuan yang mungkin hanya bertahan tidak lama yang kemudian ini menjadikan *content of policy* yang ada yaitu memiliki derajat perubahan yang diinginkan lebih tinggi karena memiliki isi kebijakan yang lebih *visioner*, membuat kualitas kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan bersama dinas terkait menjadi berkualitas dengan mempertimbangkan hal-hal besar yang akan bermanfaat bukan hanya bagi para pelaku UMKM tapi untuk seluruh masyarakat dan perekonomian daerah dengan transformasi pasca pandemi.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten bogor Dani Hedihsyah, mengungkapkan bahwa,

“Prioritas pemulihan ekonomi daerah jelas kepada para pelaku UMKM karena mereka sangat susah selama covid, upaya yang kami kerjakan lebih kepada fasilitas perizinan usaha mikro ya misalnya perizinan industri rumah tangga, ada sertifikat halal, kami juga memfasilitasi akses permodalan dan terutama masalah pemasaran kami sangat fokus kesana lah, kami fasilitasi pemasaran produk UMKM mereka” (Hedihsyah, 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah telah menetapkan prioritas yang jelas dalam pemulihan ekonomi daerah, yaitu fokus kepada para pelaku UMKM hal ini sesuai dengan konsep dari implementasi kebijakan, di mana pemilihan target yang jelas merupakan langkah yang penting, hal ini menggambarkan bagaimana pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam proses implementasi kebijakan pemulihan

ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya fokus kepada aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek teknis, permodalan, hingga pemasaran, sesuai dengan konsep implementasi kebijakan *content of policy*, tentu pendekatan ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha untuk pulih dan berkembang.

Sub bagian Usaha dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor Iwan Setiawan, menambahkan pentingnya pemasaran online bahwa,

“Penjualan produk melalui media sosial menjadi penting, itu yang kami fasilitasi kepada para pelaku UMKM tentang pemasaran produknya, program jangka menengah hingga jangka panjangnya termasuk pengembangan e-commerce tujuannya jelas mendorong UMKM go online, hastag kabupaten bogor sendiri #umkmglobal” (Setiawan, 2023).

Kemudian juga sejalan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Dengan adanya pandemi saat itu dan ditambah dengan eranya sekarang udah medsos semua, kami memfasilitasi beberapa pelatihan umkm tentang pemasaran yang bagus disosmed bagaimana, tentunya transformasi di era medsos seperti ini jangkauanya sudah bukan di lingkaran tentangga lagi, sudah bukan di bogor aja, sudah bisa dilihat semua orang kalau promosinya lewat medsos” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dua tokoh tersebut, menunjukan bahwasanya pemerintah daerah bertindak sebagai mitra yang proaktif dalam membantu para pelaku UMKM, fasilitas dan dukungan yang diberikan mencerminkan kominten untuk membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan strategi pemasaran melalui media sosial. Dukungan tersebut berupa pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, atau penyediaan panduan praktis untuk memaksimalkan potensi platform media sosial. Selain itu, pendekatan pemerintah daerah juga mencakup visi jangka panjang. Program jangka menengah

hingga jangka panjang, seperti pengembangan e-commerce, mencerminkan komitmen untuk mendorong UMKM agar "go online". Pengembangan e-commerce adalah langkah strategis yang akan membantu UMKM bersaing di pasar yang semakin terintegrasi secara digital.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor telah mengambil langkah yang tepat dalam mendukung UMKM dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dipicu oleh digitalisasi dengan menggunakan pendekatan proaktif komitmen jangka panjang, diharapkan UMKM di daerah tersebut akan dapat meraih kesuksesan dalam pemasaran online, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi pada visi #ekonomiglobal.

B. Kolaborasi pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19

Dalam proses segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi memungkinkan adanya kerjasama antar berbagai pihak terutama dengan pihak swasta, penting adanya kerjasama antar berbagai aktor yang terlibat sejalan dengan bagaimana konsep implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, karena jelas menganggap bahwa pemerintah tidak dapat jalan sendirian dengan kebijakan yang dibuatnya, serta peran sektor swasta sangat penting dalam memberikan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan secara finansial untuk keberlangsungan UMKM (Grindle. S, 2009).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam percepatan dan transformasi ekonomi daerah pasca covid-19 terbilang terjalin cukup baik, hal tersebut dapat dilihat bagaimana kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* seperti dinas-dinas terkait, Bank BUMN, dan Swasta.

1. Kolaborasi Pihak Swasta

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dalam proses melakukan kolaborasi bersama pihak swasta, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas

Koperasi UKM melakukan kegiatan fasilitasi bagi para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa sewa toko dan sarana penunjangnya, sebanyak 32 E Tals (32 Kecamatan).

Hasil dari wawancara dengan Sub Bagian Usaha dan Penanaman Modal Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa,

“Untuk ekonomi mikro tentu kami dengan dinas koperasi dan UMKM bersama-sama dalam memaksimalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh plt Bupati Kabupaten Bogor, kami bekerjasama dengan pihak swasta yang memfasilitasi kemitraan pasar modern, Aeon Mall terus Indomarco, Ikea” (Setiawan, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Saya membenarkan adanya banyaknya kerjasama baik itu antar dinas pariwisata dan dinas koperasi ukm tentu dengan pihak swasta, semisal ada pelatihan yang sekiranya ada pihak swasta yang lebih expert dibidangnya kami kerjasama untuk itu, atau misalnya beberapa produk ukm dikasih tempat di beberapa Mall di Aeon dan bersama PT. Sumber Alfaria” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dua tokoh tersebut, menunjukkan bahwasanya pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM dengan segala sektor swasta, terutama di Aeon Mall Kabupaten Bogor dan memfasilitasi kemitraan kepada para pelaku usaha mikro dengan pasar modern bersama Ikea, tentu kerjasama ini menunjukkan kolaborasi antar sektor publi dan swasta dalam mendukung program pemerintah dalam pemulihan dan transformasi ekonomi UMKM Kabupaten Bogor pasca pandemi. Hal tersebut menjadikan pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kerjasama semacam ini sesuai dengan prinsip teori implementasi

kebijakan yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediansyah, mengungkapkan bahwa,

“Memang kalau dari segi pengembangan usaha mikro butuh sekali kerjasama, baik itu antar pelaku usaha itu sendiri atau bahkan dengan pihak swasta, tentunya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor membuka seluasnya bagi seluruh pihak swasta yang ingin bekerjasama di wilayah Kabupaten Bogor tujuannya jelas untuk UMKM di Kabupaten Bogor go global” (Hediansyah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa, peran krusialnya kerjasama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Terlebih lagi, kerjasama tidak hanya terbatas pada kolaborasi antar-pelaku usaha sendiri, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor menjalankan peran penting sebagai penyelenggara kerjasama ini. Mereka membuka peluang bagi pihak swasta yang ingin berkolaborasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tujuan yang jelas adalah mendorong UMKM di daerah tersebut untuk bersiap menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain, "go global." Ini mengindikasikan visi jangka panjang pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional dan bahkan internasional.

2. Kolaborasi Pihak Bank

Selanjutnya hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, menambahkan bahwa,

“Kami juga bekerjasama dengan Bank BJB dalam pemulihan ekonomi UMKM dengan menggelar acara bazar dan pelatihan pemasaran digital,

bazar yang dilakukan itu secara online maupun langsung dan yang tadi itu kami bekerjasama dengan mall yang ada di Kabupaten Bogor” (Djayana, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, mengungkapkan bahwa,

“Dalam menyalurkan bantuan terkait dengan pencairan data bantuan langsung tunai dari Bupati juga kami bekerjasama dengan Bank BRI dan BNI untuk masalah pencairan dananya” (Nuriyanti, 2023).

Berdasarkan hasil observasi kedua tokoh tersebut, menunjukkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Bogor telah menjadi kerjasama yang beragam dengan lembaga perbankan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan transformasi ekonomi UMKM, Kerjasama dengan Bank BJB dalam menggelar acara bazar dan pelatihan pemasaran digital mencerminkan pendekatan yang holistik dalam mendukung UMKM, memberikan platform yang komprehensif untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan dan kapabilitas bisnis mereka. Selain itu, kerjasama dengan Bank BRI dan BNI dalam menyalurkan bantuan langsung tunai menunjukkan efisiensi dalam pencairan dana bantuan, memanfaatkan infrastruktur perbankan yang ada untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi dengan lebih baik. Ini mencerminkan kesadaran pemerintah Kabupaten Bogor akan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan, dalam mencapai tujuan pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi dengan efektif.

Dalam proses yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor tentang transformasi ekonomi pasca pandemi tidak lupa pentingnya peran masyarakat terhadap hal tersebut, masyarakat memiliki kemampuan dalam membantu menghidupkan Kembali perekonomian yang terpukul parah oleh dampak pandemi covid-19. Dalam upaya membangun kembali usaha mikro yang merukan tulang punggung ekonomi daerah, perang masyarakat menjadi sangat krusial, potensi masyarakat dalam memberdayakan, mendukung, dan memperkuat pelaku usaha

kecil di sekitarnya dengan berbagai cara dapat membuat perbedaan nyata dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi.

3. Kolaborasi dengan Instansi lain

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UKM), dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pemerintah Kabupaten Bogor secara teratur menyelenggarakan berbagai kegiatan fasilitasi, termasuk pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha kecil dan menengah (UMKM), akses yang mudah ke pembiayaan, bimbingan dalam pemasaran dan promosi produk, dan penyederhanaan proses perizinan. Strategi ini juga mencakup upaya kolaboratif dengan lembaga dan organisasi lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor. Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan membantu pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (RKPD, 2021).

Hasil dari wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, mengungkapkan bahwa,

“Sesuai arahan Bapak Bupati seluruh ASN di wilayah Kabupaten Bogor wajib dalam satu hari pake pakaian casual buatan UMKM lokal, harapannya masyarakat mengikuti untuk membeli produk lokal” (Nuriyanti, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya, dalam satu hari, upaya yang dipimpin oleh Bapak Bupati untuk mendorong seluruh ASN di Kabupaten Bogor untuk mengenakan pakaian santai yang dibuat oleh UMKM lokal adalah upaya yang bagus untuk mendukung dan mempromosikan produk lokal. Tindakan seperti ini dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Selain itu, ini dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk mendukung produk

UMKM lokal. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan inisiatif ini, seperti memastikan bahwa produk UMKM lokal tersedia dan berkualitas tinggi, serta memberi tahu masyarakat tentang kebijakan agar mereka dapat aktif mendukung produk lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini akan berlanjut dengan mengadakan kegiatan serupa secara teratur.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediensyah, menambahkan bahwa,

“tentu kami selalu melibatkan masyarakat dengan memaksimalkan tenaganya dalam pelaksanaan program fisik padat karya, dan melibatkan ASN di wilayah Kabupaten Bogor untuk “Beli Produk Sendiri” itu contohnya beras carita makmur kan itu hasil petani bogor” (Hediensyah, 2023). (Sasongko, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan yang bijak untuk membantu pemulihan ekonominya setelah pandemi dengan Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program fisik padat karya adalah langkah yang sangat positif karena ini meningkatkan kesehatan dan ekonomi lokal. Inisiatif seperti "Beli Produk Sendiri", seperti beras Carita Makmur yang dibuat oleh petani Bogor, adalah ide yang bagus. Dengan melakukan hal ini, Anda membantu petani lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan produk lokal.

Dengan kolaborasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, program ini ialah upaya untuk terus mendorong partisipasi ASN dan masyarakat dalam program ini, memberikan edukasi tentang manfaat dari "Beli Produk Sendiri", dan secara aktif mempromosikan produk lokal. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendukung produk lokal dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PROGRAM PEMULIHAN UMKM DI KABUPATEN BOGOR TAHUN
2020

Dalam proses implementasi kebijakan daerah menggambarkan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kapasitas UMKM di wilayahnya yang bertujuan dalam pemulihan dan transformasi ekonomi makro di daerah. Konsep implementasi kebijakan Grindle, memiliki dua konsep besar yaitu *Content of policy* dan *Context of Implementation*, dimana keduanya merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang memerlukan tindakan dan perencanaan yang baik dalam mewujudkan kebijakan yang di hasilkan bermanfaat untuk masyarakat, kemudian bagaimana kebijakan itu sendiri mampu diterapkan pada usaha mikro kecil yang faktor dari kedua konsep tersebut termasuk kepentingan, manfaat, dan perubahan yang mempengaruhi kebijakan yang ingin di tuju. Selanjutnya bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kebijakan mampu mengerahkan sumber daya yang membantu dalam proses implementasinya (Grindle, 1980).

Program pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk program dalam rangka percepatan dan transformasi ekonomi daerah, hal tersebut seperti program jangka pendek yang telah di salurkan sesuai Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2020 tentang pemberian bantuan sosial tunai kepada para pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi, Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung bantuan langsung tunai dari Bupati terealisasi untuk 1.966 usaha mikro, sebesar Rp. 5.000.000 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp.9.830.000.000 dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi UKM RI terealisasi untuk 62.329 Usaha Mikro, sebesar Rp. 2.400.000 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp. 149.589.600.000. Sehingga akumulasi bantuan yang disalurkan untuk usaha mikro yang terdampak covid-19 sebanyak 64.295 usaha mikro atau sebesar 20% dari jumlah usaha mikro yang terdampak (RKPD, 2021).

Program jangka menengah hingga panjang seperti pengembangan UMKM yang di dalamnya memuat tentang kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi kecil, dan sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain kemasan. Selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM membuat program pemberdayaan usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang di dalamnya berisi kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (diskopukm, 2020)

A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Faktor kepentingan tentunya mampu mempengaruhi proses implementasi kebijakan, sejauh mana kepentingan kelompok sasarannya dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro kecil yang mampu mempengaruhi isi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan manfaat yang di terima oleh kelompok sasaran atau *target groups*, hal ini dikarenakan kepentingan dan manfaat mampu mempengaruhi isi kebijakan yang dibuat. Hal tersebut berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran itu sendiri, sehingga penyesuaian pada rumusan masalah di dalam membuat kebijakan akan berpengaruh terhadap kepentingan dan kebutuhan untuk pelaku UMKM. Dalam peneltiian ini penulis akan berfokus pada bagaimana konsep implementasi kebijakan menurut Grindle pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM di wilayahnya. Dimana dari konsep implementasi yaitu *content of policy* akan melihat bagaimana kebijakan itu dirumuskan dengan kepentingan dan target tujuannya.

b) Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, menunjukkan bahwasanya kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yaitu para pelaku UMKM terutama di Kabupaten Bogor memiliki keinginan bukan hanya soal program jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti bantuan sosial, itu dianggap sebagai sebuah program yang sifatnya hanya sementara bahkan hanya bertahan beberapa minggu setelah cairnya program bantuan itu di salurkan terlebih masih banyaknya keperluan selain hal-hal pokok yang harus dipenuhi sehari-hari. Hasil wawancara dengan Ketua Forum UMKM Kecamatan Cileungsi Taufik Sasongko, mengungkapkan bahwa,

“Saya membenarkan adanya bantuan langsung dari pemerintah daerah, tapi paling itu bertahan berapa lama si mas, sebulan atau mungkin dua bulan dan bantuan itu kalau dipake buat kebutuhan makan dirumah udah abis. Semisal itu dipake buat bayar sewa ruko, jualan gimana kemaren itu PSBB. Saya secara pribadi pengennya lebih kepada program pelatihan yang membuat kami-kami ini berkembang, bukan lagi pelatihan jualan. Tapi lebih meningkatkan skill misalkan, kadang itu juga banyak yang adanya pelatihan tapi ga hadir, sepi gitu. Ya karena mungkin lebih milih jualan yang dapet penghasilan dari pada pelatihan yang gitu-gitu aja” (Sasongko, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya ketua UMKM di Kabupaten Bogor mewakili para pelaku usaha mikro di wilayahnya menggambarkan bagaimana realitas ekonomi mereka yang rentan, di mana bantuan langsung dari pemerintah daerah hanya memberi bantuan sementara saja, cukup untuk bertahan selama beberapa saat saja dan seringkali habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Disisi lain hal ada hal yang membuat aspirasi yang positif dari hal ini untuk mengembangkan keterampilan mereka melalui program pelatihan yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada aspek berjualan. Ini menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kemandirian finansial dan kesempatan kerja yang lebih baik dalam jangka panjang, dan menyoroti

pentingnya investasi dalam program pelatihan yang membantu meningkatkan keterampilan individu.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada pelatihan yang tersedia, masalah utama adalah bagaimana membuat program-program ini menarik perhatian sehingga lebih banyak orang tertarik untuk mengikutinya daripada hanya berfokus pada penjualan yang menghasilkan pendapatan segera. Pemerintah daerah dapat membantu orang mengatasi kesulitan ekonomi jangka panjang dan memungkinkan mereka untuk berkembang dan mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dengan menggabungkan bantuan sosial yang lebih berkelanjutan dengan program pelatihan yang lebih menarik dan bermanfaat. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Seksi Bagian Pembangunan Kecamatan Cileungsi Yayuk Dewi, mengungkapkan bahwa,

“Memang kemauan yang ada semenjak adanya pandemi kemaren ekonomi UMKM terutama menurun bahkan sampai ada yang tidak adanya pemasukan sama sekali, tentu bantuan tunai itu berharga buat para pelaku usaha, namun untuk program yang sifatnya jangka panjang semisal surat izin usaha, dan pasti selalu ada pelatihan itu ada juga dari dinas” (Dewi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya kebijakan bantuan tunai langsung serta program pelatihan bagi pelaku UMKM mempengaruhi berbagai pihak dengan beragam kepentingan dan manfaat. Bantuan tunai membantu pemerintah daerah memenuhi tanggung jawab sosial dan mengurangi dampak negatif pandemi secara sosial dan ekonomi pada jangka pendek, sementara program pelatihan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut.

Bagi pelaku usaha UMKM, bantuan tunai memberikan sumber pendapatan yang mendesak, sementara pelatihan dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Selain itu, dinas terkait atau lembaga pelatihan dapat memperoleh pendanaan tambahan dan memperluas fungsi mereka sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan ini. Dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan keuntungan ini, pelaksanaan kebijakan dapat dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat.

Program pemulihan ekonomi UMKM jangka panjang memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan keberlanjutan sektor UMKM sehingga derajat perubahan yang ingin dicapai dari tiap program jangka panjang yaitu adanya peningkatan jumlah usaha mikro di Kabupaten Bogor, peningkatan kualitas produk dan layanan. Berdasarkan hasil observasi secara langsung menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah UMKM memiliki potensi dalam menciptakan dampak panjang yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Kami sebagai dinas koperasi dan UKM tentu selalu berinovasi dalam menyiapkan program jangka panjang bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor, seperti program legalitas produk-produk UMKM, hal-hal seperti itu yang sifatnya jangka panjang dan beberapa pelatihan yang di siapkan dari dinas” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah (UMKM) dalam jangka panjang. Program seperti legalitas produk UMKM menunjukkan bahwa pelaku UMKM harus mematuhi hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu UMKM bersaing lebih baik. Pelatihan yang disiapkan oleh dinas ini juga merupakan upaya

proaktif untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pemilik usaha yang mengikuti pelatihan ini dapat memperoleh keterampilan manajemen, pemasaran, dan keuangan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Ini juga dapat membantu adopsi praktik bisnis baru dan teknologi yang lebih efisien.

c) Derajat Perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*)

Menurut Merilee S. Grindle (1980), dalam konteks perubahan yang ingin di capai melalui pelaksanaan kebijakan, pentingnya untuk selalu diingat bahwasanya tiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara jelas, dan pelaksanaan yang efektif akan menghasilkan manfaat atau hasil yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara berkelanjutan.

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan ini cukup tinggi, karena hal tersebut merupakan turunan langsung dari Peraturan Presiden yang menginisiasi adanya percepatan ekonomi pasca covid-19 di setiap daerah di Indonesia, hal tersebut di dukung dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pembentukan Komite percepatan Ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, mengungkapkan bahwa,

“Kabupaten Bogor terus melakukan percepatan ekonomi khususnya UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dengan membentuk satuan tugas, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu kesehatan dan ekonomi daerah. Keduanya harus terus beriringan sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca covid-19” (Nuriyanti, 2023).

Dari hasil wawancara tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memprioritaskan percepatan ekonomi, khususnya di sektor UMKM, sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19. Langkah-langkah konkret, seperti pembentukan satuan tugas, menunjukkan upaya serius untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Pentingnya

menggendeng UMKM dalam proses pemulihan ekonomi menjadi jelas, mengingat peran signifikan sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Keputusan untuk menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi dalam program pemulihan pasca-Covid-19 juga menunjukkan pandangan yang holistik. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa upaya memulihkan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan upaya penanganan kesehatan. Dengan menjaga keseimbangan antara dua aspek tersebut, diharapkan Kabupaten Bogor dapat mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kesehatan dan ekonomi yang sejalan menjadi landasan untuk membangun keberlanjutan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.

d) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Merilee S. Grindle (1980), berpendapat bahwasanya proses pengambilan keputusan dalam suatu kebijakna memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini, akan membahas proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan. Pentingnya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan. Analisisnya menekankan bahwa proses ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan kelangsungan kebijakan. Dengan demikian, kualitas dan integritas dari proses pengambilan keputusan akan berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Grindle membawa kesadaran bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi dan perumusannya saja, tetapi juga pada bagaimana keputusan-keputusan tersebut diambil dan dijalankan secara praktis.

Proses pengambilan keputusan menjadi fondasi dari seluruh pelaksanaan kebijakan. Keselarasan antara kebijakan yang dirumuskan dengan proses pengambilan keputusan yang baik diharapkan akan menghasilkan implementasi

kebijakan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika pengambilan keputusan menjadi kunci utama dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa kesuksesan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan visi strategis semata, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan melalui proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Kebijakan untuk pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor pasca covid-19 merupakan inisiatif PJ Bupati Kabupaten Bogor dengan membuat satuan tugas pemulihan ekonomi pasca covid-19 pada tahun 2020. Keputusan Bupati Nomor 360/352/Kpts/Per-UU/2021 tentang Pembentukan atas Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, hal tersebut merupakan dokumen pembentukan satuan tugas terhadap pemulihan ekonomi daerah yang mencakup tugas diberbagai sektor ekonomi, khususnya UMKM di wilayah Kabupaten Bogor.

Pentingnya menetapkan posisi pembuat kebijakan dengan tepat dalam konteks kebijakan pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020 adalah agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, efisien, dan efektif. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang, kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan perubahan dan manfaat bagi perekonomian daerah, terkhusus untuk masyarakat di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mempertimbangkan dua faktor penting, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang komite penanganan *Coronavirus Disease 2019* dan pemulihan ekonomi nasional, serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomo: 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang komite kebijakan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah di provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut menjadikan posisi pembuat kebijakan terkait pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor pasca covid-19 tahun 2020 melalui . Keputusan Bupati Nomor 360/352/Kpts/Per-UU/2021 tentang Pembentukan atas

Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor sudah tepat. Hal tersebut berkontribusi positif dalam pelaksanaan kebijakan dikarenakan memiliki landasan hukum yang kuat.

e) Pelaksanaan Program dan Sumber daya yang dikerahkan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program yang dibuat berjalan masih kurang sempurna, dimana masih banyak para pelaku UMKM yang masih menganggap hal seperti pelatihan yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang monoton dan kurang inovatif sehingga hal semacam ini membuat pelaku usaha enggan untuk berpartisipasi, serta pengerahan sumber daya pada setiap program dirasa masih kurang. Memiliki persepsi bahwa pemerintah dianggap belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam setiap program yang mereka jalankan. Ini menunjukkan perlu evaluasi mendalam terhadap desain dan pelaksanaan program-program ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha ini serta lebih dinamis dalam menyediakan pelatihan yang bermanfaat serta solusi yang relevan bagi mereka. Hasil wawancara dengan Ketua Ketua Forum UMKM Kecamatan Cileungsi Taufik Sasongko, mengungkapkan bahwa,

“Ya seperti yang saya bilang, beberapa pelatihan tuh di Cileungsi sendiri yang dari dinas kadang temen-temen juga mikirnya mending mereka jualan aja, lebih banyak dengerinnya kalau pelatihan sama dinas mah, kami paling ikut sebisanya atau perwakilan aja, bikin ngantuk gitu” (Sasongko, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Cileungsi Lily Kartika, mengungkapkan bahwa,

“Sebenarnya itu temen-temen di Cileungsi tuh mau aja kalau memang ada pelatihan atau pembekalan tentang promosi digital gitu-gitu, cuman karena memang beberapa juga sibuk untuk dateng ke dinas misalkan, kan itu cibinong lumayan juga, saya juga beberapa kali kalau ada undangan di

share di grup ada pelatihan ya kadang saya ikut, karena kesibukan itu sebenarnya” (Kartika, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan perasaan yang umum dimiliki oleh pelaku UMKM tentang pelatihan yang diberikan oleh dinas. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) mungkin tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mereka menganggap pelatihan itu tidak bermanfaat atau bahkan membosankan, dan mereka lebih suka fokus pada bisnis jualan mereka sendiri.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada perbedaan antara program pelatihan pemerintah daerah dan harapan dan kebutuhan pelaku UMKM. Perlu ada upaya yang lebih baik untuk membuat program pelatihan yang lebih menarik, relevan, dan berfokus pada solusi. Untuk lebih memahami kebutuhan UMKM, pemerintah daerah juga harus berkomunikasi dan terlibat lebih aktif dengan mereka. Oleh karena itu, program pelatihan dapat menjadi lebih efektif dalam membantu UMKM berkembang.

Berkaitan dengan sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusia saja seperti partisipasi peserta atau anggota yang mendukung program tertentu dari pemerintah, namun hal ini berkaitan dengan sumber daya pendukung agar terciptanya program berjalan dengan baik, sebagai gambaran bagaimana fasilitas pendukung yang memadai ataupun sumber daya keuangan yang mendukung agar terciptanya program yang baik. Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Ya terkait fasilitas yang mendukung, kami dinas koperasi dan UKM punyalah secara tempat kami ada beberapa pelatihan untuk pelaku usaha mikro kadang di kantor, di samping sini, atau kadang kami ke kantor kecamatan cibinong, jadi untuk tempat dan fasilitas yang mendukung program pelatihan dinas memadai dalam hal itu” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya Salah satu aspek positif dalam upaya dinas untuk mendukung pelaku usaha mikro (UMKM) adalah adanya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program pelatihan, seperti kantor dinas koperasi dan UKM dan kantor kecamatan di Cibinong. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para peserta pelatihan. Meskipun fasilitas fisik yang memadai merupakan langkah positif, temuan wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa ada perluasan yang diperlukan dalam desain program pelatihan agar lebih menarik dan relevan bagi pelaku UMKM. Hal ini akan membantu mereka lebih aktif berpartisipasi dalam program pelatihan yang disediakan oleh dinas, dan secara keseluruhan akan memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan bisnis UMKM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan desain program pelatihan harus dipertimbangkan lebih lanjut, selain ketersediaan fasilitas fisik yang memadai.

B. Lingkungan Implementasi (*Context of policy*)

a) Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat (*Power, Interest, dan actor involved*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor memegang kendali penuh terhadap perumusan dan menjalankan proses kebijakan, aktor yang terlibat bukan hanya saja pemerintahan sebagai pemangku kebijakan tertinggi namun dengan seluruh instansi terkait, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 360/173/kpts/Per-UU/2021 yang telah diubah dengan keputusan Bupati nomor 360/352/kpts/Per-UU/2021 tentang Pembentukan atas Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor. Dalam proses pemulihan ekonomi daerah khususnya ekonomi UMKM, dinas koperasi dan UKM Kabupaten Bogor bersama Dinas Pariwisata bekerjasama dalam pemulihan ekonomi UKM dan ekonomi kreatif yang bertugas dalam merumuskan bahan kebijakan dan program pemulihan serta transformasi ekonomi pelaku usaha mikro.

1. Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung aktor yang terlibat dalam pemulihan ekonomi mikro kecil menengah dan kreatif, yang dalam prosesnya merumuskan bahan kebijakan dan program yang ingin dijalankan serta dicapai, merancang pengembangan usaha mikro yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah, dan membangun kemitraan multipihak untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perekonomian Kabupaten Bogor Atun Nuriyanti, mengungkapkan bahwa,

“Keterlibatan banyak pihak dalam proses pemulihan ekonomi UKM di Kabupaten Bogor menjadi penting, sejak awal sudah jelas sesuai arahan pembentukan satuan tugas itu di dalamnya banyak dinas-dinas yang dilibatkan tujuannya jelas dalam percepatan dan transformasi ekonomi daerah, selama pandemi Kabupaten Bogor masalah ekonomi turun sekali, pengangguran meningkat, ekonomi jelas menurun, sehingga perlu bersama-sama semua pihak ini membentuk percepatan itu dengan menyusun rumusan yang jelas” (Nuriyanti, 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan langkah penting dalam pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor adalah keterlibatan berbagai pihak. Ini terutama penting untuk mengatasi dampak ekonomi yang menurun selama pandemi. Pembentukan satuan tugas yang melibatkan banyak dinas menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar terlibat dalam menangani masalah ini. Tujuannya, percepatan dan transformasi ekonomi daerah, menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bogor.

Selama pandemi, masalah ekonomi memburuk, dengan peningkatan pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi keadaan ini. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi UMKM, semua pihak dapat bekerja sama melalui

penyusunan rumusan yang jelas dan rencana tindakan yang terkoordinasi. Rencana ini mencakup pelatihan, akses keuangan, peningkatan infrastruktur, dan promosi barang lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Sub Bagian Usaha dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa,

“Ya keterlibatan masyarakat penting, mereka nanti kan kasih masukan setelah kebijakan kemudian program dibentuk oleh dinas-dinas, itu lah baha evaluasi kami, susunanya jelas program percepatan jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang” (Setiawan, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dua tokoh tersebut, menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor dianggap sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang serius yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dinas-dinas yang membentuk satuan tugas memiliki tujuan yang jelas: mempercepat dan mentransformasi ekonomi daerah. Masalah ekonomi seperti penurunan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan penurunan pendapatan telah menjadi fokus utama selama pandemi. Oleh karena itu, membuat rencana pemulihan yang komprehensif membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat.

Hal terpenting dari sebuah kebijakan yaitu *feedback* kepada pemerintah, hal tersebut menjadi penting penting dalam proses evaluasi dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan setelah dinas-dinas membuat kebijakan dan program. Rencana percepatan ekonomi harus jelas dan mencakup tindakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam jangka panjang dan membantu bisnis kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, menambahkan bahwa,

“Mengajak seluruh pihak termasuk dinas UKM kan jelas supaya percepatan di sisi usaha mikronya pulih dari pandemi yang berkepanjangan, kami dari Dinas UKM sesuai tugas yang ada bersama-sama merancang program yang mengembangkan usaha mikro berbasis keunggulan kompetitif wilayah, kemudian membangun kemitraan tujuan tadi mengembangkan usaha mikro kecil menengah” (Djayana, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediansyah, menambahkan bahwa,

“Ya memang tugas kami sebagai dinas yang membawahi pengembangan usaha mikro bertugas untuk membuat program turunan dari kebijakan Bupati untuk melakukan percepatan dan transformasi ekonomi daerah secara garis besarnya, dan kami membuat berbagai macam program untuk para pelaku UMKM di seluruh Kecamatan” (Hediansyah, 2023).

Hasil wawancara dua tokoh tersebut, menunjukkan bahwasanya memberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya partisipasi berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan ekonomi mikro setelah pandemi. Sebagai pemegang kekuasaan dalam topik ini, dinas UKM memahami peran penting mereka dalam merancang dan melaksanakan program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kepentingan mereka sesuai dengan tujuan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif pandemi terhadap ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam situasi ini, strategi dinas UKM berfokus pada pengembangan usaha mikro yang didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah. Strategi ini menunjukkan cara yang strategis untuk memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan UMKM adalah hal yang sama pentingnya bagi pemerintah daerah, yang diwakili oleh bupati.

2. Divisi Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung mendapati sesuai keputusan Bupati bahwa, penggabungan antara ekonomi UMKM dan ekonomi kreatif bersama Dinas Pariwisata dilakukan agar monitoring yang dilakukan mudah, dan memang keduanya baik ekonomi mikro dan industry kreatif terdampak selama masa pandemi, yang tujuannya bersama dalam merancang pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing keunggulan kompetitif dan membangun kemitraan multipihak di bidang ekonomi kreatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Pandemi telah berdampak pada ekonomi kreatif dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan menggabungkannya dengan Dinas Pariwisata, tentu tujuannya mempermudah pengawasan dan pemantauan kedua sektor ini. Dinas Pariwisata memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai aspek ekonomi yang terkait dengan pariwisata” (Djayana, 2023).

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediansyah, menambahkan bahwa,

“Meskipun UMKM seringkali menjadi penyedia produk dan layanan yang unik dan berkualitas tinggi, yang dapat meningkatkan daya tarik pariwisata lokal, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan mendukung UMKM, kami berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan membantu UMKM berpartisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi ini” (Hediansyah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari dua tokoh tersebut menunjukkan bahwasanya, peran penting mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik pariwisata lokal.

Pengakuan bahwa UMKM seringkali menjadi penyedia produk dan layanan unik dan berkualitas tinggi menunjukkan betapa membantunya mereka dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Hal tersebut juga menunjukkan niat untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kemajuan ekonomi kreatif. Ini bisa mencakup membantu meningkatkan keterampilan dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, yang memungkinkan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, kalimat ini menunjukkan pendekatan yang luas untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan mengakui peran penting usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam prosesnya.

b) Kepatuhan dan Daya Tanggap Masyarakat (Compliance and Responsiveness)

Dalam proses pelaksanaan berbagai program pemerintah tidak selalu berjalan dengan mulus, hambatan dan tantangan pada masyarakat dalam menerima informasi yang didapat dirasa sangat kurang. Hal tersebutlah yang menjadi ada kalanya program yang dirancang oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM menjadi sangat sulit dilaksanakan, terlebih dengan banyak hal yang dirasa kurang dari segi anggaran menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian program berjalan dengan baik. Hasil wawancara dan observasi langsung dengan Seksi Bagian Pembangunan Kecamatan Cileungsi Yayuk Dewi, mengungkapkan bahwa,

“Sebenarnya kendala yang terjadi di Kecamatan Cileungsi terkait program peningkatan kapasitas UMKM itu banyaknya pelaku usaha yang memiliki kekurangan pengetahuan, lalu keterampilan dalam mengelola bisnisnya mereka gitu. Sekalinya ada program pelatihan dari dinas ya gitu, yang datang ya itu-itu aja, jadi kurangnya kesadaran kalau pelatihan seperti itu membuat pengetahuan dalam mengelola usaha mereka” (Dewi, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Ketua Ketua Forum UMKM Kecamatan Cileungsi Taufik Sasongko, mengungkapkan bahwa,

“memang selalu kalau ada pelatihan dari dinas itu kadang yang datang orangnya sama saja, semisal ada pelatihan ya selalu saya share di grup, tapi ya itu permasalahannya selalu itu gitu.” (Sasongko, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa di Kecamatan Cileungsi, kendala utama untuk program peningkatan kapasitas UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh banyak pelaku usaha. Mereka biasanya menghadapi masalah dalam mengelola bisnis mereka, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan bisnis. Lebih dari itu, orang masih terbatas dalam berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh dinas atau pihak terkait karena mereka kurang menyadari pentingnya pendidikan bisnis dan pelatihan. Mungkin pelaku UMKM tidak menyadari sepenuhnya manfaat pelatihan yang relevan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program pelatihan yang lebih menarik, relevan, dan menguntungkan bagi pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih aktif untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola bisnis mereka dengan baik.

Selanjutnya Ketua Ketua Forum UMKM Kecamatan Cileungsi Taufik Sasongko, menambahkan permasalahan yang terjadi bahwa,

“permasalahan yang terjadi kemarin itu, banyak temen-temen yang ngeluh masalah perizinan, terus masalah legalitas produk lah, kendala persyaratan. Kemarin masalah pencairan dana bantuan langsung tidak semua dapet, yang terjadi bukan satu orang dapet bantuan, tapi dikasih ke saya sebagai ketua terus akhirnya uang bantuan itu kami buat sewa ruko untuk temen-temen jualan produknya disitu” (Sasongko, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya perizinan dan legalitas produk adalah masalah utama bagi pelaku UMKM di

Kecamatan Cileungsi. Ini termasuk prosedur yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, dan ketidakpastian hukum. Kendala-kendala ini dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan menimbulkan ketidakpastian dalam operasi mereka. Selain itu, masalah yang terkait dengan penyaluran dana bantuan juga menjadi perhatian, karena proses penyaluran dana yang tidak selalu lancar dan tidak jelas, yang dapat berdampak pada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada bantuan ini untuk pemulihan ekonomi mereka.

Namun, jawaban tersebut juga menunjukkan upaya inovatif untuk memecahkan masalah, seperti menggunakan dana bantuan untuk menyewa ruko untuk mendukung rekan UMKM yang menjual produk mereka. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah dan menemukan solusi bagi UMKM. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan keterjangkauan informasi tentang legalitas produk karena alam menghadapi masalah ini. Untuk memastikan bahwa dana bantuan didistribusikan secara adil dan transparan juga penting. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh narasumber, kolaborasi aktif antara UMKM dan pihak berwenang dalam mengeksplorasi solusi kreatif dapat menjadi model yang berguna untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kecamatan Cileungsi dan meningkatkan daya saing bisnis kecil dan menengah dalam mendukung pemulihan ekonomi wilayah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“permasalahan itu tentu selalu ada, baik dari kami selaku pemerintah yang kadang dirasa tidak semua tercapai program yang dilakukan selama ini, memang masalah terkait dengan legalitas produk itu kami sedang gencar-gencarnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM, hal itu dirasa sangat penting dari pada hanya sekedar bantuan tunai misalnya, itupun keterbatasan anggaran sehingga tidak semua dapat bantuan, jadi legalitas

produk menjadi program jangka panjang dari Dinas UKM” (Djayana, 2023).

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memahami masalah yang dihadapi oleh UMKM saat menjalankan program pemulihan ekonomi. Mereka telah mengidentifikasi legalitas produk sebagai masalah yang penting dan saat ini berusaha keras untuk memberi tahu para pelaku UMKM pentingnya legalitas produk, meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki cukup anggaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada semua UMKM. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan Dinas UKM proaktif dalam mengembangkan program yang relevan dan berkelanjutan.

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediansyah, mengungkapkan bahwa,

“Sebenarnya hambatan yang paling terasa itu kadang kurangnya data dari usaha yang berkembang di tiap Kecamatan menyulitkan kami, karena kan kadang bertambah atau berkurangnya di tiap Kecamatan berubah dan kadang disana tidak di data secara bekal, itu yang kadang menyebabkan salah informasi atau kekeliruan koordinasi diantara dinas dan Kecamatan” (Hediansyah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan Hasil wawancara tersebut menunjukkan, dalam konteks konsep implementasi lingkungan yang dikemukakan oleh Grindle, bahwa salah satu elemen lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan program pemulihan ekonomi UMKM adalah kekurangan data yang akurat. Faktor ini dapat dianggap sebagai hambatan atau kendala yang muncul dari lingkungan eksternal dalam proses penerapan kebijakan. Pemerintah daerah dapat kesulitan merencanakan dan mengkoordinasikan program dengan baik jika tidak ada data yang tepat.

Dalam implemenrasi program pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor adalah kekurangan data tentang pertumbuhan bisnis di setiap Kecamatan.

Ketidakpastian ini mencakup informasi seperti jumlah UMKM, jenis usaha, dan perubahan dalam kegiatan ekonomi, yang dapat membuat sulit untuk memahami situasi sebenarnya di lapangan. Kurangnya data berkala dapat menyebabkan koordinasi antara dinas dan kecamatan menjadi sulit, yang dapat menyebabkan salah informasi dan kekeliruan koordinasi. Untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan informasi yang lebih akurat dan up-to-date bagi pihak yang terlibat dalam program pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor, sangat penting untuk melakukan pembaruan data yang teratur dan bekerja sama dalam pengumpulan data.

C. Masalah dalam Implementasi

Masalah dalam implementasi merupakan faktor yang seringkali menjadi perhatian. Masalah implementasi kebijakan atau program merupakan hal yang umum terjadi, dalam beberapa kasus, pelaksanaan berjalan tanpa masalah yang signifikan, masalah dapat timbul mencakup berbagai masalah, mulai dari hambatan administrasi, maupun aktor-aktor yang terlibat.

hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bogor Dani Hediensyah, mengungkapkan bahwa,

“Program terkait dengan pemulihan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor cukup berjalan lancar, kami mengalami kendala hanya pada saat pencairan dana bantuan langsung dari Bupati, itu karena banyak masyarakat yang kesulitan dalam hal pencairan dana saja” (Hediensyah, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Adi Djayana, mengungkapkan bahwa,

“Permasalahan itu tentu selalu ada, baik dari kami selaku pemerintah yang kadang dirasa tidak semua tercapai program yang dilakukan selama ini, memang masalah terkait dengan legalitas produk itu kami sedang gencar-gencarnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM, hal itu dirasa sangat penting dari pada hanya sekedar bantuan tunai misalnya, itupun keterbatasan anggaran sehingga tidak semua dapat bantuan, jadi legalitas

produk menjadi program jangka panjang dari Dinas UKM” (Djayana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwasanya perizinan dan legalitas produk adalah masalah utama bagi pelaku UMKM di Kecamatan Cileungsi. Ini termasuk prosedur yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, dan ketidakpastian hukum. Kendala-kendala ini dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan menimbulkan ketidakpastian dalam operasi mereka. Selain itu, masalah yang terkait dengan penyaluran dana bantuan juga menjadi perhatian, karena proses penyaluran dana yang tidak selalu lancar dan tidak jelas, yang dapat berdampak pada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada bantuan ini untuk pemulihan ekonomi mereka.

Secara keseluruhan masalah yang timbul dan kerap terjadi, karena adanya faktor eksternal ataupun penerima kebijakan yang kurang tanggap dengan program yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bogor, faktor yang mampu mendukung adanya pelaksanaan program berjalan dengan lancar dengan adanya persiapan yang matang, koordinasi yang baik antar *stakeholder*, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif dari eksternal maupun internal kebijakan.

D. Dampak kebijakan pada Ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor

Kebijakan yang dibuat akan selalu memberikan perubahan, terhadap sasaran program pada setiap kebijakan. Hal tersebut tentunya adalah yang diinginkan dari setiap kebijakan ke arah yang lebih baik bagi sasaran kebijakan yaitu masyarakat.

Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020 memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut mencakup aspek:

Pertama, adanya program Bantuan Langsung Tunai untuk para pelaku UMKM yang terkena dampak dari covid-19 di Kabupaten Bogor. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana tersebut. Selain itu, program bantuan

langsung tunai ini membantu mereka dalam pembelian bahan baku produk UMKM yang dimilikinya.

Dalam data yang didapat oleh penulis dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung bantuan langsung tunai dari Bupati terealisasi untuk 1.966 usaha mikro, sebesar Rp. 5.000.000 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp.9.830.000.000 dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi UKM RI terealisasi untuk 62.329 Usaha Mikro, sebesar Rp. 2.400.000 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp. 149.589.600.000. Sehingga akumulasi bantuan yang disalurkan untuk usaha mikro yang terdampak covid-19 sebanyak 64.295 usaha mikro atau sebesar 20% dari jumlah usaha mikro yang terdampak (RKPD, 2021).

Kedua, adanya program Legalisasi hak produk bagi para pemilik UMKM. Sehingga tidak hanya bantuan secara langsung saja dirasakan, namun program jangka panjang dengan adanya pelatihan dan legalitas produk menjadi sangat penting untuk para pelaku UMKM untuk kedepannya. Program legalisasi hak produk bagi pemilik UMKM mencerminkan pendekatan proaktif dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memberikan fokus pada legalitas produk, program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat fondasi bisnis mereka secara berkelanjutan.

Proses legalisasi hak produk memberikan pemilik UMKM akses yang lebih baik ke pasar, melindungi hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan daya saing produk mereka. Selain itu, program ini memberikan pelatihan yang penting untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang proses legalisasi dan hak kekayaan intelektual, mempersiapkan mereka untuk tantangan dan peluang dalam dunia bisnis yang semakin kompleks.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab empat dan lima, maka penulis menyimpulkan bahwa belum sempurnanya implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM di Kecamatan Cileungsi untuk saat ini, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku UMKM sampai pada tingkat Kecamatan. Datang dan perginya para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cileungsi yang tak terdata di Dinas Koperasi UKM menjadikan permasalahan bantuan yang sulit di salurkan serta kurangnya kreatifitas dan kurang inovatif dalam membuat program menjadikan para pelaku usaha enggan untuk mengikuti program pelatihan peningkatan kapasitas UMKM di Kecamatan Cileungsi. Dimana hal tersebut di sebabkan oleh:

1. Isi kebijakan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konsep Grindle, adanya kepentingan ataupun kebutuhan dari para pelaku UMKM yang mendesak mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan membentuk satuan tugas percepatan dan transformasi ekonomi daerah. Hal tersebut merupakan respon yang proaktif terhadap masalah yang terjadi, yang kemudian memperhatikan manfaat yang diinginkan diharapkan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat (*target groups*). Adanya pelaksanaan program dilakukan masih berproses sampai saat ini, hal tersebut guna meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan berbagai macam program yang dirumuskan serta pengerakan sumber daya guna mengimplementasikan kebijakan, baik dari segi fasilitas yang memadai dalam menunjang keberhasilan kebijakan dengan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga terciptanya kesinambung antar kolaborasi tersebut yang baik demi keberhasilan kebijakan yang di cita-citakan bersama.

2. Implementasi Lingkungan dengan adanya kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat terlihat bersinergi dengan baik, terciptanya kerjasama dan pembuatan program baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Hal tersebut membuat kerjasama antar institusi di dalam satuan tugas memerlukan karakteristik lembaga yang baik sehingga faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan atau lembaga dimana kebijakan itu diterapkan. Kemudian faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok masyarakat yang dituju dengan kebijakan yang dibuat, hal tersebut masih sangat kurang tentu bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa minimnya koordinasi dan informasi antar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor dengan para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor masih sangat kurang, sehingga implementasi kebijakan terhadap pemulihan ekonomi sampai saat ini masih berjalan kurang baik.

B. Refleksi Teori

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadikan gambaran terkait pentingnya implementasi kebijakan daerah terhadap pemulihan ekonomi pasca covid-19, terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar membuat kebijakan dan program melihat kepentingan serta kebutuhan masyarakat (*target groups*) sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, semoga pemerintah daerah Kabupaten Bogor lebih mengedepankan kebijakan jangka panjang sehingga efeknya akan jauh lebih besar. Dan kemudian juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah perbandingan atau gambaran bagi daerah lainnya untuk bagaimana implementasi kebijakan daerah terhadap pemulihan ekonomi daerahnya. Selanjutnya dijadapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap dunia ilmu Pendidikan dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian mengenai implementasi kebijakan daerah.

C. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran bahwa seharusnya pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM harus lebih inovatif dalam memberikan program pelatihan sehingga pelaku usaha yang menjadi sasaran program tersebut tertarik dengan apa yang menjadi tujuan bersama pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadikan program yang dihasilkan tepat sasaran. Selanjutnya pemerintah daerah perlu menyusun dan mengkaji program jangka panjang dalam pemulihan ekonomi daerah, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan tujuan bersama menjadi mudah tercapai dengan UMKM Kabupaten Bogor *Go Global*.
2. Pertimbangkan untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem informasi yang lebih efisien untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi data antara dinas dan kecamatan. Ketiga, pikirkan tentang kolaborasi yang lebih kuat antara dinas, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengumpulan dan pertukaran data. Selanjutnya melakukan analisis tentang cara data diperbarui secara berkala untuk menemukan metode yang lebih efisien. Keenam, melakukan penelitian komparatif dengan bidang lain yang telah mengatasi masalah serupa untuk menemukan praktik terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Akib, H. (2018). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Alatas, A. R., Pontoh, R., & Morad, A. M. (2022). Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah: Peningkatan Kapasitas Produksi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*.
- Amri, A. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA*, Volume 2 No. 1.
- Anas, F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan*.
- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. S., Binolombongan, F., & Endey, N. (2021). Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASI TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO*.
- Aprilia, H. (2021). Peningkatan Kapasitas UMKM Kuliner Melalui Pelatihan Digital Marketing. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan*.
- Aqila, F. N. (2021). *BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH. KAJIAN UMKM DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021*.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra.
- Bogorkab*. (2019, Juni 2). Retrieved from Sejarah Kabupaten Bogor.
- Creswell, J. (1998). *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publication.
- Darwis, R. S., & Zainuddin, M. (2020). Penguatan Kapasitas Wirausahawan Mikro Menggunakan Metode Pendampingan di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*.

- Dewi, Y. (2023, Juli 24). Seksi bagian Pembangunan Kecamatan Cileungsi. (M. Subarkah, Interviewer)
- Diskominfo Kabupaten Bogor. (2022). *Pemkab Bogor Dorong Pergerakan Ekonomi Dengan Mendukung UMKM*. Bogor: Portal Resmi Kabupaten Bogor.
- diskopukm*. (2020, Maret). Retrieved from Dinar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor: <https://diskopukm.bogorkab.go.id/tantangan-dan-usaha-pemulihan-ekonomi-daerah-bagi-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-kabupaten-bogor-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Djayana, A. (2023, Juli 31). Strategi Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19. (M. Subarkah, Interviewer)
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Handayani, A. D. (2023). JURNAL SIGNAL, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. *DIGITALISASI UMKM: PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PROGRAM LITERASI*.
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto. (2021). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*.
- Hediansyah, D. (2023, Juli 31). Strategi Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19. (M. Subarkah, Interviewer)
- Hernikawati, D. (2020). BPSDMP Kominfo Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Dampat Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang*.
- Isnani, Z. N. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan PSBB*.
- JDIH BPK*. (2020, Juli 20). Retrieved from Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Kadir, A., Alam, S., & Lukman. (2022). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19)*.
- Kartika, L. (2023, Juli 30). Pelaku UMKM di Kecamatan Cileungsi. (M. Subarkah, Interviewer)
- Karyono, Rohadin, & Indriyani, D. (2022). *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu*.

- Maghvira, A., & Rusli, Z. (2021). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Strategi Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Daerah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru.*
- Maliardi, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital (Studi Kasus Pada Forum UMKM Kompak di Kecamatan Larangan).*
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration.* Lonton: Stage.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabet.
- Nafis, R. W. (2021). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdi Marga, Vol. 2, No. 1.*
- Nuriyanti, A. (2023, Juli 11). Upaya Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19. (M. Subarkah, Interviewer)
- Peraturanbpk.* (2020, Oktober 27). Retrieved from Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro Atau Pelaku Usaha Kecil Dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Di Kabupaten Bogor.
- Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.* Surakarta: UNISRI Press.
- Prasetya, E. R. (2020). Universitas Pamulang, Banten. *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bogor.*
- Pratiwi, D. K., & Hidayati, R. (2021). *Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Perspektif Hukum Responsif).*
- RKPD.* (2021). Retrieved from Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.
- Sasongko, T. (2023, Juli 30). Ketua Forum UMKM Kecamatan Cileungsi. (M. Subarkah, Interviewer)
- Setiawan, I. (2023, Juli 11). Upaya Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi UMKM pasca covid-19. (M. Subarkah, Interviewer)
- Setiyawati, H. (2019). Universitas Muhammadiyah Malang. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusi dan Peningkatan Akses Pelayanan PUblik Bagi Anak.*

- Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). *Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Manado*.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardani, A. K., & Romas, A. N. (2021). Politeknik Rukun Abdi Luhur. *Analisis Strategi Digital Marketing di Masa Pandemi Covid-19*.
- Yuliwati, A. K., Rofaida, R., & Gautama, B. P. (2021). Peningkatan Kapasitas Digital UMKM Melalui Pelatihan Pemasaran Digital di Masa Pandemi Covid-19 di Belitung. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 1

Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR Dadi Kusumayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 09 Juni 2023

Nomor : 000.9.2 /383 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor
di-
Tempat

Dasar :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang
Surat Kasub Bag Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo , Nomor : 1269/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2023, Tanggal 29 Mei 2023, Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :
Nama : **MUHAMMAD SUBARKAH**
Alamat : Jl. Batu Jambur No. 63 D Rt. 015 Rw. 005 Desa Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah Studi Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasca Covid-19 di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : **H.A. Gunawan, S.Ag, M.H**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 12 Juni 2023 s.d 12 September 2023
Tempat : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor
3. Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ict menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Berkoordinasi dan mengikut petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR
Drs. **BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si**
Peminda Utama Muda IV c

Tembusan :
1. Yth. Hl. Bupati Bogor (Sebagai Laporan).
2. Yth. Kasub Bag Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo.


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Ratai Sertifikasi Elektronik (RS/ES) Riset Siber dan Sains Nasional

Lampiran 1 2

Foto Bersama Bagian Perekonomian dan Sub Bagian Usaha dan Penanaman Modal
Kabupaten Bogor



Lampiran 1 3

Foto Bersama Seksi Pembangunan Kecamatan Cileungsi



Lampiran 1 4

Foto Bersama Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor



BIODATA



Nama : Muhammad Subarkah
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 28 Desember 2000
Alamat : JL. Batu Jambrot No.63 D RT.15 RW.05
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI
Jakarta
Telepon/Hp : 085893790973
Email : barkahmuhammad88@gmail.com
Agama : Islam
Nama Orang Tua
 Ayah : Rodilan
 Ibu : Suratmi
Jumlah Saudara : 1
Anak Ke : 2
Riwayat Pendidikan : SDN 1 Ciangsana Kec. Gunung Putri
Kabupaten Bogor (2007-2013)
SMPN 1 Cileungsi Kec. Cileungsi
Kabupaten Bogor (2013-2016)
SMAN 1 Cileungsi Kec. Cileungsi
Kabupaten Bogor (2016-2019)
Fakultas FISIP UIN Walisongo
(2019-Sekarang)